



Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018

**Evaluasi Capaian Pembangunan dan Relevansi Dokumen
Perencanaan**

Provinsi Lampung

**Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas**

Tim Pelaksana EKPD

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2018: Evaluasi Capaian Pembangunan dan Relevansi Dokumen Perencanaan

Penanggungjawab

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas

Ketua Pelaksana

Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas

Tim Penulis

Dinar Dwi Prasetyo (SMERU)
Marselina Djayasinga (Universitas Lampung)

Editor

Jovany Aliflyantero Adistana (Dit. PEPPD Bappenas)
Alex Oxtavianus (Dit. PEPPD Bappenas)

ISBN: 978-623-90297-0-8

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kementerian PPN/Bappenas

Isi dan materi yang ada dalam buku ini dapat diproduksi dan disebarluaskan dengan tidak mengurangi isi dan arti dari dokumen ini. Diperbolehkan untuk mengutip isi buku ini dengan menyebutkan sumbernya.

Kata Pengantar

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) merupakan salah satu kegiatan evaluasi *ex-post* tahunan yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappenas bekerjasama dengan professional, peneliti, dan akademisi di 34 provinsi. Pada tahun ini, evaluasi fokus pada capaian, relevansi, dan efektivitas RKP 2017.

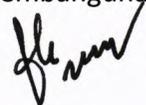
Laporan evaluasi capaian dan relevansi di setiap provinsi menjelaskan hasil capaian makro ekonomi dan dan RKP 2017 di 34 provinsi, serta hasil relevansi antara permasalahan dan tantangan pembangunan daerah dan perencanaan daerah dalam RKPD Provinsi 2018. Dalam laporan juga menuliskan warna daerah yang berisi cerita khas daerah. Hasil evaluasi juga menunjukkan target pembangunan kewilayahan yang belum dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rekomendasi spesifik daerah dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi daerah.

Selain mendapatkan hasil capaian RKP 2017, laporan ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan memberi masukan untuk menyusun perencanaan pembangunan berikutnya. Laporan ini juga dapat dimanfaatkan oleh publik untuk mendapatkan informasi capaian pembangunan di 34 provinsi.

Akhir kata, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan EKPD 2018. Perbaikan metodologi dan kolaborasi yang lebih produktif akan dilaksanakan pada evaluasi kedepan untuk kualitas evaluasi dan manfaat yang lebih besar.

Terima kasih.

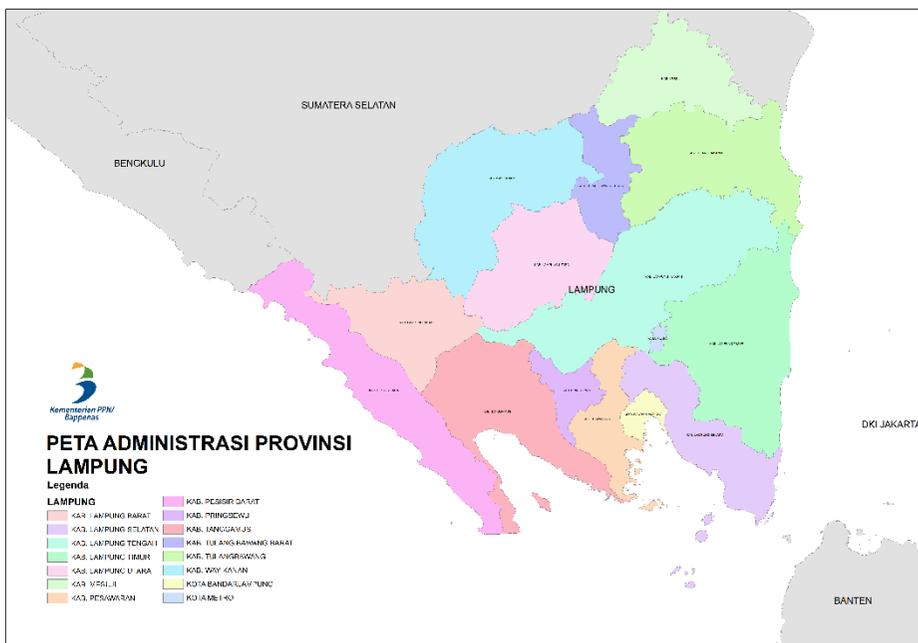
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi,
dan Pengendalian Pembangunan



Taufik Hanafi



PROVINSI LAMPUNG



DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan Dan Manfaat	4
1.3 Batasan Evaluasi.....	4
METODOLOGI	5
2.1 Metode Evaluasi.....	6
2.1.1 Analisis Gap.....	6
2.1.2 Analisis Dokumen.....	6
2.2 Ruang Lingkup.....	7
2.2.1 Evaluasi capaian RKP di daerah.....	7
2.2.2 Evaluasi Relevansi Dokumen Perencanaan Daerah	9
ANALISIS	11
3.1 Evaluasi Capaian	12
3.1.1 Indikator Makro	14
3.1.2 Indikator Prioritas Nasional RKP 2017	28
3.2 Analisis Relevansi	39
PENUTUP	45
Simpulan dan Saran	46
Lampiran	50
Tabel Analisis Relevansi RKPD dan RPJMD	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Provinsi Lampung	13
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2015-2018 (%)	14
Gambar 3.3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2015-2018 (%)	17
Gambar 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Lampung 2015-2018 (%) .	18
Gambar 3.5	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung dan Indonesia Maret 2015- Maret 2018 (%)	20
Gambar 3.6	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Indonesia Maret 2015- Maret 2017 (%)	21
Gambar 3.7	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Maret 2015- Maret 2018 (%)	22
Gambar 3.8	Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Maret 2015- Maret 2018 (%)	23
Gambar 3.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan (P2) Provinsi Lampung dan Indonesia Maret 2015- Maret 2018 (%)	23
Gambar 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Maret 2015- Maret 2018 (%)	24
Gambar 3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Provinsi Lampung dan Indonesia Agustus 2015 dan Agustus 2017 (%)	25
Gambar 3.12	Jumlah Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Provinsi Lampung dan Indonesia Agustus 2015 dan Agustus 2017 (%)	26
Gambar 3.13	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia 2015 - 2017	26
Gambar 3.14	Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung 2015 - 2017	27
Gambar 3.15	Indeks Gini Provinsi Lampung dan Nasional Maret 2015 - Maret 2018	28
Gambar 3.16	Perkembangan Rata rata Lama Sekolah Provinsi Lampung 2015-2017	29
Gambar 3.17	Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Lampung 2015-2017 ..	29
Gambar 3.18	Perkembangan Produksi Padi Lampung 2015 - 2017.....	30

Gambar 3.19 Perkembangan Produksi Daging Sapi 2015 - 2017.....	31
Gambar 3.20 Akses Air Minum Layak Provinsi Lampung 2015-2017	32
Gambar 3.21 Akses Sanitasi Layak Provinsi Lampung 2015-2017	33
Gambar 3.22 Perkembangan Angka Prevalensi Kontrasepsi (%) Provinsi Lampung 2015 - 2017	36
Gambar 3.23 Perkembangan Jumlah Puskesmas yang minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Lampung 2015 - 2017	36
Gambar 3.24 Perkembangan Kepemilikan Akte (40%) Provinsi Lampung 2015 - 2017	37
Gambar 3.25 Perkembangan Redistribusi Tanah Provinsi Lampung 2015 - 2017 ..	38
Gambar 3.26 Perkembangan Sertifikat Hak Atas Tanah Provinsi Lampung 2015 - 2017	38

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Perbandingan IPM dan Komponennya Nasional dan Provinsi Lampung 2017	27
---	----



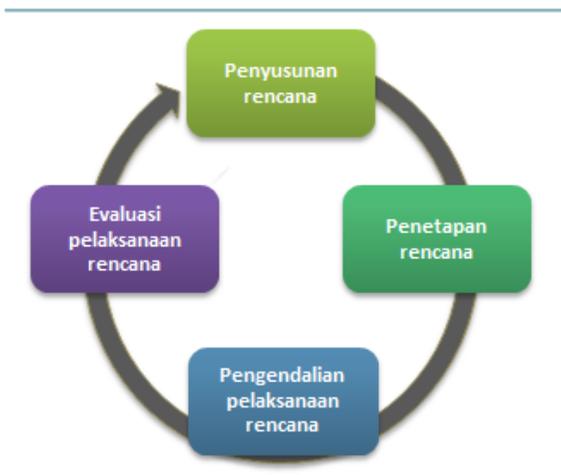
1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Siklus pembangunan secara umum melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan di Indonesia mengacu kepada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, ditujukan untuk: (1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah, (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Secara spesifik, Undang-undang SPPN menyatakan bahwa evaluasi merupakan bagian dalam tahapan perencanaan yang ditujukan untuk menilai hasil ataupun capaian terhadap pelaksanaan perencanaan sebagai masukan untuk perencanaan di tahap berikutnya.

Gambar 1.1 Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional



Perkuatan peran evaluasi semakin jelas dan krusial melalui terbitnya Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam PP tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mendapat mandat untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan mengevaluasi kebijakan

tahun berjalan dalam rangka menentukan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan. Pembangunan nasional dalam perspektif undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengacu pada konsep pembangunan nasional tersebut, evaluasi pembangunan nasional yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas meliputi evaluasi pembangunan sektoral (pusat) dan evaluasi pembangunan daerah.

Evaluasi pembangunan pusat dan evaluasi pembangunan daerah bersifat saling menguatkan dan komplementer. Dari sisi subjek evaluasi, keduanya dapat dipandang sebagai bentuk evaluasi yang berbeda, namun dari sisi objek evaluasi kedua evaluasi tersebut boleh jadi memiliki objek yang sama. Dalam konteks pengentasan kemiskinan misalnya, boleh jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki program dan kebijakan yang berbeda. Namun kebijakan tersebut boleh jadi memiliki objek yang sama, yaitu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, evaluasi pembangunan pusat dan evaluasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) memandang penting untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah atau EKPD. Kegiatan ini merupakan evaluasi *ex-post* terhadap RKP 2017, yang mengusung tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Walaupun merupakan evaluasi *ex-post* terhadap RKP 2017, EKPD tidak saja melakukan evaluasi terhadap kebijakan dalam RKP, tetapi juga kebijakan daerah yang mendukung sasaran RKP.

Kegiatan EKPD dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan peneliti dan profesional serta didukung oleh akademisi daerah, Bappeda Provinsi dan pihak-pihak lain yang relevan. Keterlibatan banyak pihak diharapkan memperkaya hasil analisis dan meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi. Hasil EKPD dapat menjadi rekomendasi dalam penyusunan dokumen perencanaan periode berikutnya khususnya yang terkait dengan pembangunan kewilayahan.

Gambar 1.2 Tema RKP 2017-2019



Kegiatan EKPD Tahun 2018 fokus pada 4 (empat) hal, yaitu: pencapaian, relevansi, efisiensi dan efektivitas. Terkait laporan EKPD di 34 provinsi, evaluasi

fokus pada capaian pembangunan nasional di daerah dan relevansi dokumen perencanaan daerah dalam rangka menjawab tantangan pembangunan daerah.

1.2 Tujuan Dan Manfaat

Tujuan dari pelaksanaan EKPD Tahun 2018 di 34 provinsi adalah:

1. Mengevaluasi capaian pembangunan nasional di daerah
2. Mengevaluasi relevansi dokumen perencanaan daerah

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan evaluasi ini adalah sebagai bahan masukan maupun rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Gambar 1.3 Alur Pelaksanaan EKPD 2018



1.3 Batasan Evaluasi

Evaluasi di 34 provinsi merupakan evaluasi pencapaian dan evaluasi relevansi. Evaluasi pencapaian bersifat *ex-post* terhadap RKP 2017 di daerah sesuai tema RKP 2017 yaitu “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Evaluasi capaian dilakukan terhadap indikator sasaran RKP 2017. Mengingat ketersediaan data, evaluasi capaian dibatasi untuk indikator sasaran RKP 2017 yang datanya tersedia hingga ke tingkat provinsi. Terkait evaluasi relevansi, batasan evaluasi adalah pada dokumen perencanaan tahunan provinsi, khususnya RKPD 2018.



2

METODOLOGI

2.1 Metode Evaluasi

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 34 provinsi Tahun 2018 merupakan evaluasi *ex-post* yang dititikberatkan pada evaluasi pencapaian dan relevansi. Metode evaluasi yang digunakan adalah analisis gap dan analisis dokumen. Terkait pengumpulan data, metode yang dilakukan dalam EKPD terdiri atas beberapa metode antara lain metode kualitatif dan kuantitatif yang terkait kebijakan/program/kegiatan untuk dilakukan penilaian.

2.1.1 Analisis Gap

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi pembangunan nasional, analisis gap dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai). Gap dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain analisis gap merupakan langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Dalam laporan ini, evaluasi pencapaian yang digunakan membandingkan pencapaian daerah dengan:

- a. Target RKP 2017 (jika ada)
- b. Capaian tahun sebelumnya
- c. Capaian nasional

Analisis gap tidak hanya membandingkan capaian dan target namun juga ditindaklanjuti secara mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi permasalahan ataupun keberhasilan atas pencapaian pembangunan yang didasarkan pada intervensi kebijakan/regulasi/penganggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

2.1.2 Analisis Dokumen

Analisis dokumen merupakan bentuk dari penelitian kualitatif dimana peneliti menginterpretasikan dokumen dalam rangka mendalami informasi terkait topik penilaian yang menjadi fokus evaluasi (Bowen, 2009)¹. Evaluasi relevansi EKPD 2018 dilaksanakan dengan menganalisis dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD) tahun 2017 mengenai prioritas dan program daerah dan

¹ Glenn A. Bowen, (2009) "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 Issue: 2, pp.27-40, <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

membandingkannya dengan permasalahan atau tantangan daerah. Perbandingan ini dilakukan untuk menilai apakah dokumen peencanaan daerah telah disusun dalam rangka menjawab permasalahan spesifik daerah tersebut.

2.2 Ruang Lingkup

Untuk laporan EKPD 2018 di 34 provinsi, analisis evaluasi fokus pada dua elemen sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Analisis Utama EKPD 2018 Laporan 34 Provinsi



2.2.1 Evaluasi capaian RKP di daerah

Evaluasi capaian meliputi evaluasi capaian makro ekonomi dan prioritas nasional RKP di daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan data referensi lain: nasional, antar waktu, dan target dokumen perencanaan. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa evaluasi capaian dapat disebut evaluasi pengukuran kinerja yang dilakukan dengan analisis gap yaitu membandingkan capaian dengan target. Dalam praktiknya, tidak semua indikator makro dan prioritas nasional mempunyai target. Oleh karena itu, analisis gap didekati dengan data referensi lain yaitu capaian tahun sebelumnya ataupun capaian nasional. Lokus analisis dilakukan pada **level provinsi dan antar kabupaten/kota** dalam provinsi tersebut.

a. Lingkup Indikator yang Dianalisis

Indikator Makro Ekonomi

Indikator makro ekonomi yang akan dianalisis dalam EKPD 2018 terdiri dari lima indikator makro utama, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi;
2. Tingkat Kemiskinan;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka;
4. Indeks Gini;
5. IPM.

Indikator Sasaran Prioritas Nasional RKP 2017

Indikator prioritas nasional di daerah yang akan dianalisis dalam EKPD 2018 terdiri dari:

1. Prioritas Nasional Kesehatan yang terdiri atas indikator: a) Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi suatu cara; dan b) Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
2. Prioritas Nasional Pendidikan yang terdiri atas indikator: a) Rata-rata lama sekolah; dan b) Angka melek huruf
3. Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK yang terdiri atas indikator: a) Pertumbuhan Industri; dan 2) Kontribusi dalam PDRB
4. Prioritas Nasional Antar Kelompok Pendapatan yaitu indikator Kepemilikan akta lahir
5. Prioritas Nasional Reforma Agraria yang terdiri atas indikator: a) Bidang tanah yang redistribusi; dan b) Sertifikat HAT (Hak Atas Tanah)
6. Prioritas Nasional Kedaulatan Pangan yang terdiri atas indikator: a) Produksi Padi; dan b) Produksi Daging Sapi
7. Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman yang terdiri atas indikator: a) Akses air minum layak; dan b) Akses sanitasi layak

b. Tahapan Analisis

Untuk setiap indikator, tahapan analisis yang dilakukan adalah:

1. Melakukan analisis deskriptif kuantitatif level provinsi dengan membandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (5 tahun terakhir), target yang ditetapkan (Target RKP/RKPD), dan target nasional.
2. Melakukan analisis deskriptif kuantitatif dengan membandingkan capaian antar kabupaten/kota dengan capaian tahun sebelumnya (data antar waktu), capaian provinsi dan nasional untuk tahun yang sama.

3. Apabila capaian kurang bagus, tim evaluasi menjelaskan **faktor penyebab** capaian turun/ tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Apabila capaian baik, tim evaluasi menjelaskan **faktor pendukung** capaian, yaitu kebijakan/program/kegiatan/ proyek pemerintah pusat dan daerah yang menjadi pendorong capaian indikator. Dalam analisis dapat menggunakan data pendukung lain yang terkait dengan Prioritas Nasional sebagai alat bantu analisis.
5. Menyajikan rekomendasi kebijakan operasional berdasarkan hasil evaluasi.
6. Pelaksana utama evaluasi capaian adalah tim evaluasi. Pada tahap 3-5, Bappeda dan akademisi membantu memperkaya analisis dalam konsolidasi wilayah. Selain memperkaya analisis, akademisi juga membuat tulisan singkat terkait isu-isu spesifik di masing-masing provinsi.

2.2.2 Evaluasi Relevansi Dokumen Perencanaan Daerah

Dokumen perencanaan daerah disusun untuk menyelesaikan permasalahan daerah dan mendukung pembangunan nasional. Perbedaan karakteristik dan tantangan daerah berimplikasi pada perencanaan daerah yang spesifik dalam menjawab tantangan tersebut dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Analisis deskriptif mengenai keterkaitan dokumen perencanaan daerah dan tantangan daerah tersebut, dilakukan melalui evaluasi keterkaitan permasalahan/tantangan pembangunan daerah dengan prioritas dan program daerah yang ditetapkan. Tahapan dalam melaksanakan evaluasi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tim evaluasi menelaah RKPD 2018 daerah bersangkutan. Hasil **telaah** disusun dengan format tabel dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Tim evaluasi menelaah permasalahan dan mengisi satu permasalahan pada kolom (2). Permasalahan dimaksud dapat diambil dari Bab II RKPD 2018. Permasalahan juga dapat berdasarkan hasil analisis pada evaluasi capaian dan literatur ilmiah lain.
 - b. Tim evaluasi mengisi sasaran dalam RKPD (kolom 3) yang berkaitan dengan permasalahan (kolom 2).

- c. Tim evaluasi mengisi prioritas daerah (kolom 4) yang berkaitan dengan permasalahan. Prioritas daerah dapat dilihat pada Bab IV RKPd.
- d. Tim evaluasi mengisi program prioritas (kolom 5) yang merupakan penjabaran prioritas daerah (kolom 4) yang dapat menjawab permasalahan (kolom 3). Program prioritas daerah terdapat pada Bab V RKPd 2018.
- e. Tim evaluasi mengisi indikator program prioritas daerah (kolom 6), yang merupakan tolak ukur keberhasilan program prioritas daerah (kolom 5).
- f. Lakukan langkah a hingga e untuk setiap permasalahan pembangunan daerah yang diidentifikasi.
- g. Apabila tidak termuat program prioritas daerah, dapat mengacu pada program daerah pada lampiran RKPd.
- h. Pelaksana utama evaluasi relevansi adalah tim evaluasi. Bappeda dan PTN membantu memepertajam hasil evaluasi saat konsolidasi.

Tabel 2.1 Tema RKP 2017-2019

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas*	Indikator Program Prioritas*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1
2
3
...

2. Tim Evaluasi menyusun **analisis singkat** berdasarkan hasil telaah RKPd dan RPJMD yaitu mengenai permasalahan yang telah dan belum dijabarkan dalam dokumen perencanaan daerah.
3. Tim Evaluasi menyusun **rekomendasi** berdasarkan hasil telaah dan analisis mengenai:
 - a. Prioritas daerah yang perlu dilanjutkan pada Tahun 2020
 - b. Prioritas daerah baru yang perlu muncul pada Tahun 2020

Intervensi pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan daerah sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.



3

ANALISIS

3.1 Evaluasi Capaian

Program Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah **“LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019”**.

Misi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019:

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran;
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Mendukung supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

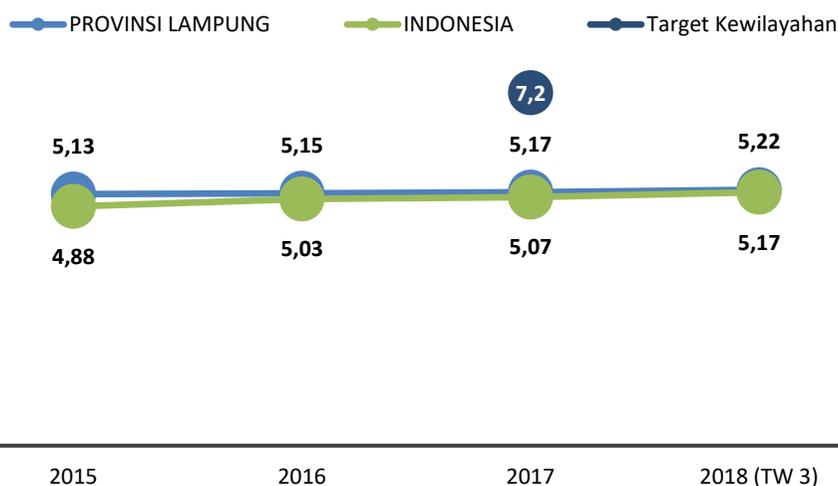
Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang baik dari arah Pulau Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Secara keseluruhan kawasan provinsi Lampung memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian, pariwisata, maupun industri. Hal ini terlihat dari Secara terinci, pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan IV-2015 tumbuh 5,33 persen bila dibandingkan triwulan IV-2014 (*y-on-y*). Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali Pertambangan dan Pengalihan yang mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen. Konstruksi merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 14,13 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 11,41 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,06 persen. Struktur perekonomian Lampung pada triwulan IV-2015 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25,51 persen); Industri Pengolahan (20,83 persen); Perdagangan

3.1.1 Indikator Makro

Pertumbuhan Ekonomi

Capaian pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Lampung sejak tahun 2015 berada di atas rata-rata nasional, yaitu mencapai 5,13 persen pada 2015, 5,15 persen pada 2016, dan 5,17 persen 2017, serta hingga triwulan III-2018 Lampung tumbuh sebesar 5,22 persen. Namun demikian, angka pertumbuhan setiap tahun naik sekitar 0,02 poin ini cenderung kurang progresif dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi nasional di setiap tahun yang melejit lebih 0,15 poin selama 2015-2016 dan 0,04 poin pada 2016-2017.

Gambar 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung 2015-2018 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari struktur pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masih ditopang oleh pengeluaran pemerintah daerah dan konsumsi masyarakat, sementara kontribusi swasta belum banyak berperan. Hingga saat ini, target investasi dari BKPM belum terealisasi, jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam yang potensinya masih sangat besar. Sementara itu dari sisi produksi, sektor pertanian dan industri pengolahan masih mendominasi perekonomian, namun komoditas pertanian dan industri pengolahan makanan yang dihasilkan petani dan rumah tangga produknya sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambahnya kecil. Tidak banyak penambahan industri pengolahan yang berdiri yang menjadikan produk itu diolah lebih lanjut.

Untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung yang lebih riil, tinggi dan merata untuk semua penduduk, diperlukan banyak program untuk meningkatkan investasi yang masuk ke Lampung untuk mengolah komoditas yang dijual dalam bentuk bahan mentah menuju industri pengolahan yang meningkatkan nilai tambah, termasuk bantuan pemasaran untuk UMKM termasuk solusi untuk

mengatasi masalah pasokan listrik, kepastian hukum, kepastian berusaha, keamanan, dan infrastruktur.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung berada di atas rata-rata nasional namun tingkat kemiskinan juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini sebenarnya semu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memiliki *trickle down effect* pada masyarakat. Karena sektor industri sebagai penopang perekonomian Lampung masih *resource based* dan dikuasai segelintir industri besar sementara usaha produktif rakyat tidak banyak memberi kontribusi pada PDRB. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Lampung Timur, dimana PDRB banyak disumbangkan oleh *resources based commodity*, seperti singkong, karet, dan udang yang belum diolah lebih lanjut sehingga nilai tambahnya masih rendah. Penduduk banyak yang bekerja di sektor industri pengolahan tersebut, dan sektor pertanian, namun hanya menjadi buruh pabrik, buruh lepas, buruh tani karena tingkat pendidikan mereka rendah, hampir 70 persen dari mereka hanya tamat SD atau lebih rendah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Provinsi Lampung sehingga investasi tidak optimal adalah masalah ketimpangan wilayah. Dalam pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur harus merata, memadai dan seimbang. Di Provinsi Lampung yang terjadi adalah kurang meratanya dan terbatasnya daya dukung infrastruktur dan suprastruktur antar kabupaten/kota dan antar wilayah. Sehingga terjadi disparitas pembangunan antar kabupaten dan kota yang ada di Lampung. Ketimpangan antar kabupaten ini yang menjadi penghambat utama bagi masuknya investasi di provinsi Lampung. Kurangnya sarana prasarana jalan, jembatan, pasokan listrik, air bersih, dan internet menyebabkan inefisiensi perekonomian karena tingginya biaya logistik. Dalam pasar komoditas yang masih *resource based* ini, tidak mungkin untuk diterapkan *free market* ketika kualitas sumber daya manusia masih rendah dengan tingkat pendidikan yang rendah pula. Sehingga, diperlukan regulasi pemerintah daerah yang lebih produktif seperti pemberian *tax holiday*, insentif investasi, serta pembagian tugas antar kabupaten/kota sesuai fungsi di wilayah Lampung, sesuai potensinya masing-masing. Modal sosial juga perlu dibangun melalui penguatan kelembagaan, pemberian pendidikan budi pekerti, setiap penduduk ada jiwa kewirausahaan, masyarakat yang ramah terhadap pendatang dan wisatawan.

Wilayah perkotaan sebagai pusat pemerintahan, pemerintah dengan sumber daya yang relatif lebih besar, secara progresif membangun jalan, *flyover*, *underpass* di dalam wilayahnya masing-masing. Sementara itu di wilayah perdesaan, aksesibilitas ke wilayah pelosok yang tidak merata. Seperti di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang masih terdapat jalan-jalan yang sulit dilewati karena masih berupa jalan tanah. Langkah yang masih terus dilakukan pemerintah daerah setempat adalah dengan memperbaiki infrastruktur jalan dan terus berupaya membuka wilayah-wilayah yang masih terisolir. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini menggunakan dana dari pinjaman daerah. Demikian juga

dengan bantuan pemerintah pusat, telah dilakukan program perencanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan jalan Provinsi Lampung, dengan target jalan dalam kondisi mantap, yaitu masing masing pada 2017 sepanjang 77,4 persen, kemudian 81 persen pada 2018 dan 85 persen pada tahun 2019. Pembangunan jalan di Provinsi Lampung saat ini diprioritaskan untuk membuka sentra-sentra industri di wilayah Provinsi Lampung sehingga PDRB Provinsi Lampung tidak hanya disumbangkan dari industri besar semata dan dari wilayah perkotaan saja, tapi juga didukung oleh juga aktivitas ekonomi seluruh masyarakat luas dan dari pojok-pojok wilayah Provinsi Lampung. Sekaligus mendukung program membangun dari desa dan desa berkembang sesuai potensi masing-masing.

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, untuk meningkatkan aktivitas perekonomian, Pemerintah Provinsi Lampung juga melaksanakan beberapa kebijakan dalam tiga tahun terakhir, di antaranya:

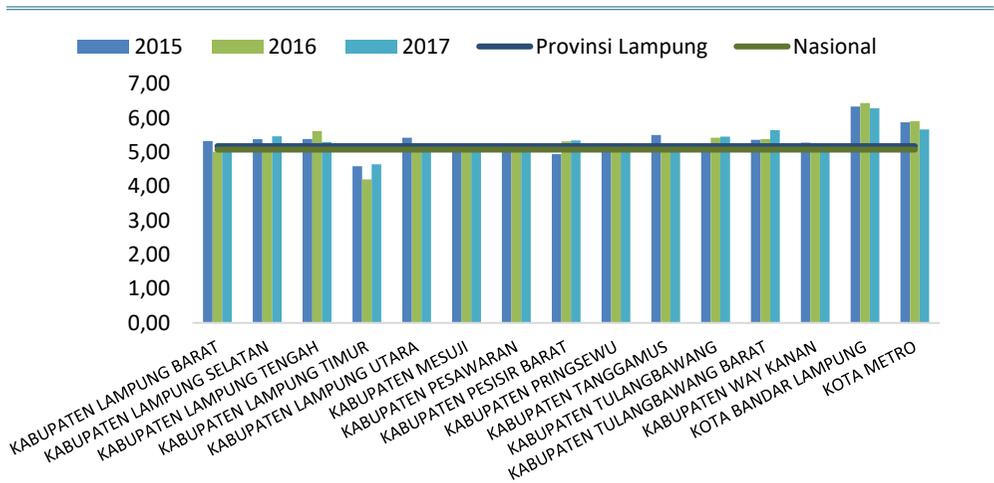
- (1) Mendorong pengembangan Koperasi dan UKM dengan bantuan permodalan melalui BLUD sejak tahun 2016 utk KUMKM Rp 52,68 milyar untuk 2365 pelaku usaha;
- (2) Mengalokasikan dana APBD total sejak 2012-2017 Rp 20,4 miliar untuk membantu 30 koperasi, 15 lembaga pendidikan dan 107 wirausaha baru. Dengan program al: pelatihan, fasilitasi permodalan, fasilitasi pinjaman dana bergulir, fasilitasi promosi dan pameran berbasis informatika dan teknologi serta fasilitasi hak cipta dan hak merek bagi para wira usaha pemula;
- (3) Mengalokasikan dana Dekon dan dana DAK nonfisik, masing masing Rp3,1 miliar dan Rp2 miliar dan fokus sektor industri yang banyak dibantu industri kreatif yang mendukung pariwisata Lampung;
- (4) Menyalurkan dana KUR untuk membantu UMKM, dimana tahun 2016 telah disalurkan Rp2,5 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 129.550 pada 2016 dan sampai dengan Februari 2017 tersalurkan kredit Rp 121,86 miliar dengan jumlah 4.132 debitur;
- (5) Meningkatkan daya saing UKM dengan memasarkan produk melalui internet, bantuan mengikuti pameran, promosi produk unggulan (APBD).
- (6) Mendorong peningkatan kinerja di sektor-sektor yang sinergistik, business friendly, inklusif, dan kekinian, dan;
- (7) Menjaga stabilitas harga terutama harga pangan melalui TPID.

Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada di ujung Pulau Sumatera, sebagai pintu gerbang masuk Pulau Jawa dan Pulau Sumatera atau sebaliknya telah banyak mempengaruhi perekonomian Lampung. Kedekatan antar Jakarta dengan waktu tempuh hanya 6-8 jam melalui transportasi darat atau 30 menit melalui transportasi udara atau ke provinsi tetangga, Lampung, Bengkulu dan Jambi menyebabkan perekonomian Lampung tumbuh dengan pesat. Arus mobilitas dan migrasi sangat tinggi di Provinsi Lampung yang mempengaruhi jumlah penduduk,

tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk. Arus orang dari Pulau Jawa sangat tinggi untuk mencari penghidupan yang lebih baik di Provinsi Lampung.

Di tengah derasnya mobilitas dan distribusi orang, barang/jasa, sehingga, banyak data produksi yang salah prediksi. Misalkan data produksi padi di Lampung tercatat sangat tinggi, namun padi/gabah itu sudah tidak ada karena beras sudah mengalir ke daerah lain dengan cepat (Jakarta, Tangerang, Palembang, Bengkulu, Jambi, dan sebagainya). Di sisi lain, faktor kedekatan Provinsi Lampung dengan Jakarta dan Pulau Jawa juga menyebabkan arus percepatan uang (*velocity of money*) sangat tinggi ke luar Lampung. Banyak perusahaan di Provinsi Lampung yang kantor pusatnya di Jakarta, sehingga perputaran uang ke luar Lampung tinggi hanya sekedar untuk belanja, liburan, rekreasi, berobat hingga untuk pendidikan anak-anaknya. Potensi PPh dan PPN yang lari ke luar Lampung juga cukup besar. Kondisi ini juga terjadi di wilayah-wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yang membelanjakan uangnya ke Bandar Lampung atau langsung ke Jakarta. Status kepemilikan lahan di wilayah Provinsi Lampung juga terpengaruh oleh faktor kedekatan dengan Jakarta ini sehingga ada fenomena banyak lahan yang idle dalam pemanfaatannya karena dimiliki orang Jakarta dan tidak bisa dimanfaatkan lebih banyak.

Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2015-2018 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data per kabupaten/kota, wilayah Kota Bandar Lampung dan Metro masih menjadi dua wilayah utama yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Kota Bandar Lampung mencapai pertumbuhan sebesar lebih dari 6 persen, satu-satunya di Provinsi Lampung.

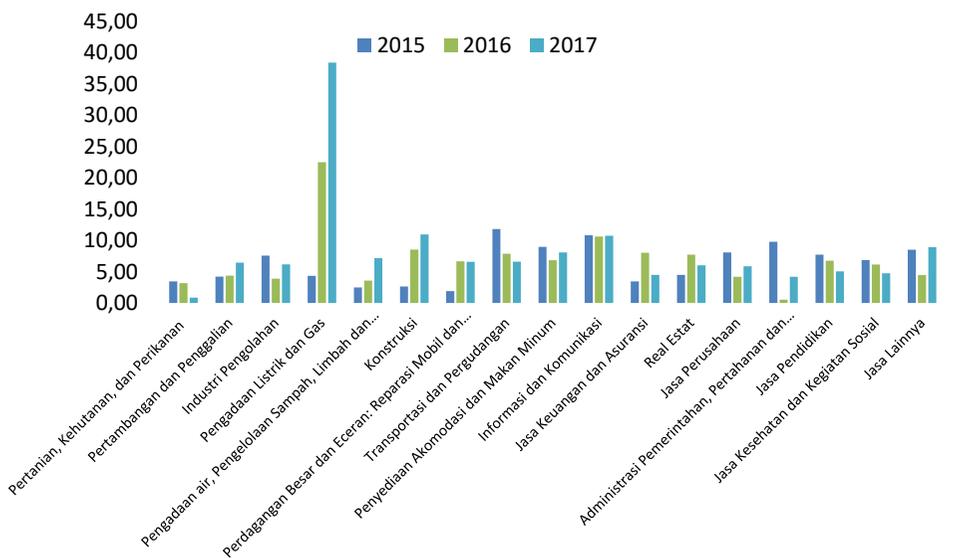
Secara sektoral, struktur perekonomian Provinsi Lampung pada akhir tahun 2017 masih didominasi tiga sektor utama yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan atau pangsa 24,27 persen, sektor industri pengolahan 20,85 persen serta

sektor perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor 12,09 persen. Di sisi lain, penurunan pangsa sektor pertanian di akhir tahun sesuai pola historis seiring belum masuknya musim panen dan pengaruh cuaca ekstrim pada produktivitas tanaman pangan.

Di kabupaten/kota di Provinsi Lampung, kehadiran usaha yang dapat membuka lapangan kerja lebih luas lagi masih sangat terbatas. Selain masalah infrastruktur, masalah keamanan juga menjadi faktor yang menghambat. Di Kabupaten Lampung Timur, angka kriminalitas yang cukup tinggi membuat kegiatan ekonomi cenderung lesu. Data BPS 2017 menunjukkan Lampung masuk ke dalam 10 besar Provinsi dengan angka kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian (10.465 kasus pada 2016). Banyaknya penduduk usia produktif yang memilih terlibat dalam kegiatan kriminal seperti perampokan dan lain-lain juga disebabkan oleh angka pengangguran yang tinggi. Sementara itu, konflik sosial antara pendatang dari Bali dan penduduk asli juga masih dapat meletup sewaktu-waktu. Di kabupaten tersebut, perkelahian antar kampung seringkali masih terjadi.

Selain itu, lesunya ekonomi di Lampung Timur juga disebabkan oleh kecenderungan pegawai di sana untuk berbelanja kebutuhan mereka di luar daerah, khususnya Bandar Lampung. Sehingga, tidak terjadi perputaran uang yang cukup di masyarakat Lampung Timur untuk menggerakkan perekonomian.

Gambar 3.4 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Lampung 2015-2018 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama tahun 2016 dan 2017, sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor yang paling tinggi pertumbuhannya yaitu mencapai 22.49 persen pada 2016 dan 38.43 persen pada 2017. Angka ini jauh di atas sektor-sektor lainnya yang

pertumbuhannya berada pada angka sekitar 5-15 persen. Sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, dan pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, menjadi sektor-sektor yang juga mengalami tren peningkatan selama tahun 2015-2017. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan, cenderung menurun dari tahun 2015 hingga 2017.

Kontribusi PDRB Lampung tertinggi adalah pertanian yang berorientasi ekspor. Adapun dalam sektor gas dan listrik, Lampung hanya sebagai penyuplai namun dampak ke daerahnya tidak terlalu terlihat karena pasokan listrik di Lampung hingga saat ini masih bermasalah.

Terkait investasi dan industrialisasi, Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pertahanan RI, saat ini sedang melakukan kajian terkait kemungkinan membangun industri maritim di Kabupaten Tenggamus. Nantinya, kabupaten ini diproyeksikan sebagai pusat industri pertahanan di Indonesia. Hingga saat ini, pemerintah provinsi sudah memastikan tersedianya lahan dan pelabuhan yang dibutuhkan untuk industri tersebut.

Sektor lain yang sedang berkembang di Provinsi Lampung adalah pariwisata. Saat ini, pariwisata di Lampung semakin meriah, jumlah kunjungan semakin meningkat dari tahun ke tahun². Selain Pulau Pahawang, juga muncul objek wisata lain seperti Teluk Nipah dan Teluk Kiluan. Namun demikian, para pelaku usaha di objek wisata yang ada saat ini masih membutuhkan pembinaan agar lebih dapat melayani wisatawan dengan profesional. Hal lain yang juga penting adalah integrasi objek wisata sehingga dapat mencakup pasar yang lebih banyak. Sementara ini, pengelolaan objek wisata masih individualistik.

Tingkat Kemiskinan

Sementara itu, angka kemiskinan nasional saat ini berada di bawah kisaran 11 persen, angka kemiskinan di Lampung cukup besar karena melebihi persentase nasional. Angkanya berada di kisaran 13.14 pada tahun 2018. Angka ini cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai angka di atas 14 persen.

Sebagian besar, 70 persen, masyarakat Lampung tinggal di wilayah perdesaan. Di wilayah tersebut biasanya terdapat lahan-lahan perkebunan yang luas. Penduduk yang sebelumnya pemilik lahan, saat ini hanya menjadi buruh pertanian/perkebunan atau petani kecil dengan lahan yang terbatas (*subsisten*) karena lahan mereka sudah dibeli oleh pihak perkebunan. Sementara itu, pemilik lahan bukanlah penduduk Lampung, tetapi penduduk di luar daerah. Penguasaan individu-individu tertentu terhadap lahan cukup tinggi.

² Data kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa...

Gambar 3.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Lampung dan Indonesia Maret 2015- Maret 2018 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Para buruh tani dan petani kecil ini merupakan bagian dari penduduk miskin di Provinsi Lampung. Selain udang, karet, dan sawit, petani di Lampung juga menanam singkong sebagai komoditas utama. Namun demikian, penghasilan mereka dari singkong tidak besar. Di setiap kabupaten di Lampung, hanya ada sedikit perusahaan pengolah singkong. Mereka beroperasi secara oligopoli dengan kecenderungan menekan harga singkong serendah-rendahnya ketika membeli dari para petani. Sementara itu, para petani tidak memiliki daya tawar yang tinggi.

Data BPS 2017 menyebutkan bahwa dari sembilan golongan komoditas makanan yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di perkotaan di Provinsi Lampung, peringkat pertamanya adalah rokok kretek filter. Untuk wilayah perkotaan pengaruh rokok sebesar 22,81 persen mengalahkan beras 22,48 persen. Sedangkan di pedesaan 13,07 persen menduduki peringkat kedua setelah beras 26,03 persen.

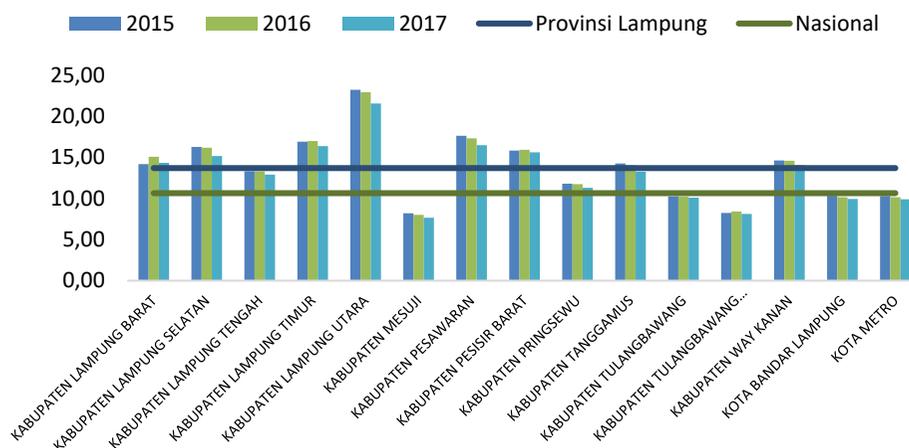
Derasnya arus migrasi di Provinsi Lampung turut berkontribusi atas fenomena ketimpangan sosial yang semakin tinggi. Para pendatang dari luar daerah, khususnya Pulau Jawa dengan tingkat pendidikan, keahlian, dan kemauan yang lebih tinggi, telah membuat penduduk asli tertinggal secara ekonomi dan sosial. Ada perubahan struktur penduduk antara penduduk asli dan pendatang yang perlu mendapatkan perhatian besar pemerintah daerah. Dengan memberikan pendidikan, memacu kedewasaan penduduk dan memperbanyak program-program yang bersifat *local wisdom*, *social capital* perlu diimplementasikan di provinsi ini untuk mengatasi kesenjangan sosial, perseteruan antar kampung atau antaretnis.

Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui beberapa program unggulan. Sejak tahun 2015 Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan *Program Gerbang Desa*

Saburai dengan melibatkan lima pemerintah kabupaten/kota dan BPS untuk bersinergi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa miskin dan kelembagaan ekonomi desa. Terdapat 380 desa tertinggal dari 2.435 desa yang ada, dimana pemilihan desa tertinggal menggunakan data Indeks Kemajuan Desa dari BPS. Hasilnya terjadi perubahan status Kemajuan Desa. Pada tahun 2014, terdapat 380 jumlah desa tertinggal yang menjadi pilot project *Gerbang Desa Saburai* tahun 2017, tinggal menjadi 119 desa atau penurunan sekitar 31 persen desa miskin. Misal Tahun 2014 di Kab Tanggamus terdapat 100 desa tertinggal, tahun 2017 hanya tinggal 28 desa. Mesuji tahun 2014 mempunyai 31 desa menjadi 9 desa tertinggal tahun 2017.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2017 telah membentuk Tim Pengentasan Penanggulangan Kemiskinan Lampung (TP2KL) yang tujuannya untuk merancang strategi penanggulangan kemiskinan di setiap kabupaten/kota. Setiap satuan kerja bekerja sama membina 2-3 desa tiap kabupaten. Pada periode 2018-2019 Pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan pembangunan jalan ke kabupaten/kota dengan kemiskinan tinggi seperti Lampung Barat, Mesuji, untuk membuka akses desa-desa miskin.

Gambar 3.6 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Indonesia Maret 2015-Maret 2017 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

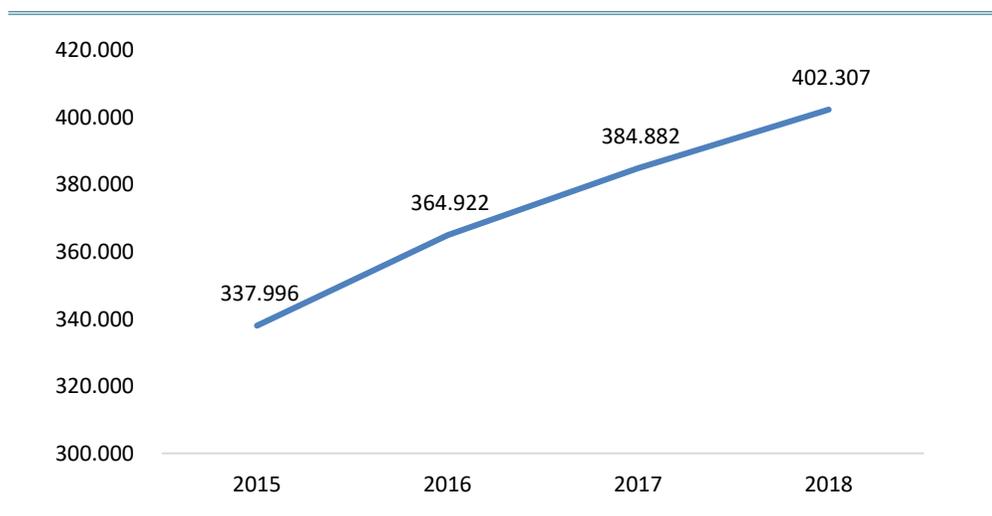
Berdasarkan komposisinya, sampai dengan September 2017, penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dengan pangsa sebesar 80,44 persen, sedangkan sisanya berada di daerah perkotaan (Bank Indonesia, 2018).

Berdasarkan wilayahnya, angka kemiskinan tertinggi berada di wilayah Lampung Utara, yang mencapai 21.55 persen pada tahun 2017. Kabupaten ini sekaligus menjadi kabupaten dengan capaian pengentasan kemiskinan terbaik antara 2015 – 2017 dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 1.65 persen dalam dua tahun. Dari grafik di atas, tampak bahwa penduduk miskin di Provinsi Lampung lebih banyak berada di wilayah perdesaan daripada perkotaan.

Program unggulan yang digulirkan Kabupaten Lampung Utara, seperti sekolah gratis dan pengobatan gratis nampaknya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena beban pengeluaran masyarakat otomatis menurun.

Di Kabupaten Tulang Bawang barat dan Mesuji, lahan masih luas dengan jumlah penduduk yang sedikit. Saat ini, sebagian besar penduduknya, terutama generasi muda, memilih untuk merantau ke kota atau luar provinsi, bahkan sebagai TKI di luar negeri. Penghasilan penduduk setempat tercatat dalam statistik, sehingga dapat disebut sebagai kesejahteraan semu.

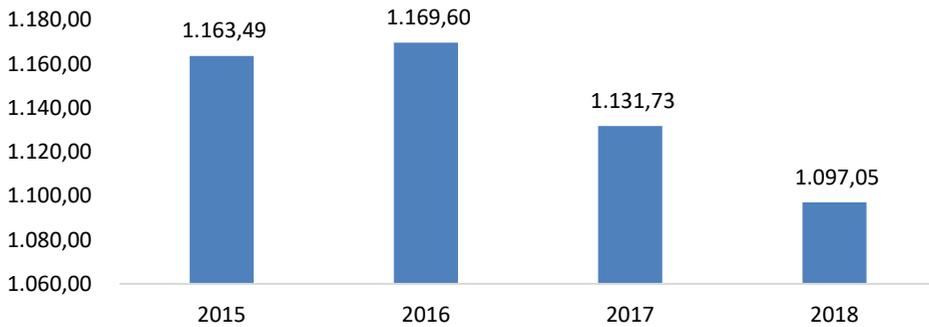
Gambar 3.7 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Maret 2015- Maret 2018 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Garis kemiskinan di Provinsi Lampung selama tiga tahun, 2015-2018, cenderung meningkat. Jumlah tersebut berada pada besaran Rp337,996 per kapita per bulan pada tahun 2015, menjadi sekitar Rp402,307 per kapita per bulan pada 2018.

Gambar 3.8 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Lampung Maret 2015- Maret 2018 (000 orang)

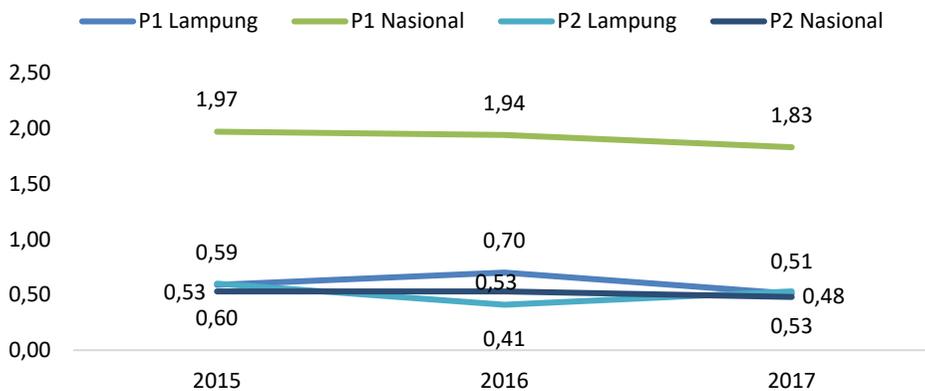


Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara garis kemiskinan cenderung meningkat, jumlah penduduk miskin cenderung fluktuatif selama 2015-2017. Angka penduduk miskin berkisar pada jumlah 1,163 juta orang pada 2015, kemudian naik sedikit menjadi 1,169 juta orang pada 2016, kemudian turun signifikan menjadi 1,131 juta orang pada 2017.

Tingkat kedalaman kemiskinan di Provinsi Lampung selama tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi, berkisar di atas angka 2 persen. Angka ini berada di atas kedalaman kemiskinan nasional yang berada di angka 1,97 persen pada 2015 dan terus turun hingga mencapai 1,83 persen pada 2017.

Gambar 3.9 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan (P2) Provinsi Lampung dan Indonesia Maret 2015- Maret 2018 (%)



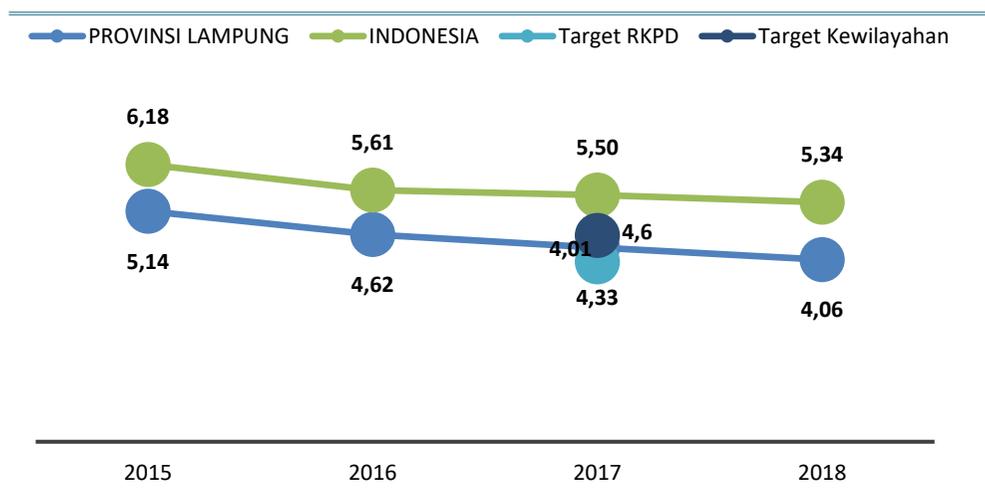
Sumber: Badan Pusat Statistik

Demikian pula, keparahan kemiskinan di Provinsi Lampung. Angka keparahan kemiskinan di provinsi ini sempat naik pada tahun 2016 menjadi 0,70 persen, kemudian turun lagi menjadi 0,51 persen pada 2017. Angka ini juga masih berada di atas capaian nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2016 sebesar 4,62 persen atau sekitar 190,35 ribu orang, meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,14 persen atau sekitar 196,9 ribu di tahun 2015. Dalam skala nasional, TPT Provinsi Lampung pada periode tahun 2011-2016 masih berada dibawah TPT Indonesia. Sementara itu, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2015 sebesar 5,14 persen. Angka ini kemudian turun menjadi 4,62 persen pada tahun berikutnya. Pada 2017 dan 2018, angka ini turun kembali menjadi 4,33 persen dan 4,06 persen.

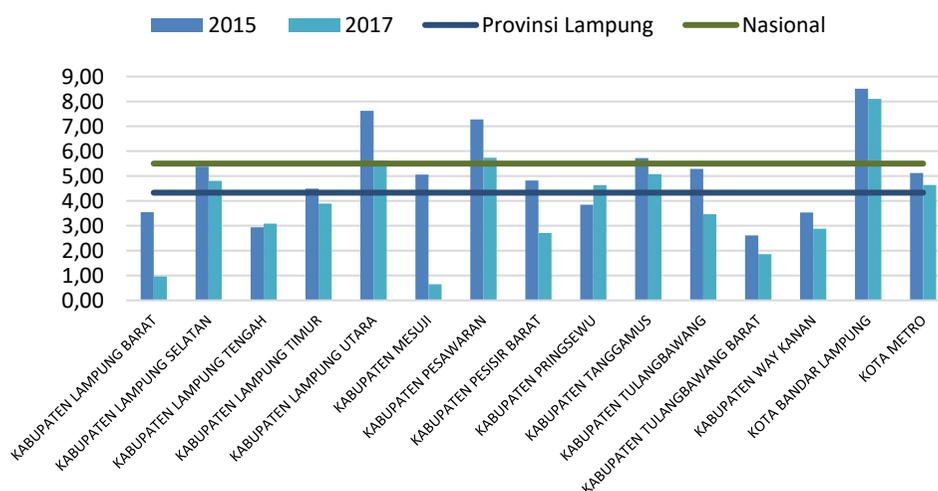
Gambar 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Lampung dan Indonesia Maret 2015- Maret 2018 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang semakin turun ini di Provinsi Lampung tetap harus diwaspadai karena dibalik penurunan ini terdapat permasalahan. Kemiskinan di wilayahnya, ketimpangan pendapatan dan infrastruktur, serta kedekatan dengan Jakarta telah memotivasi sebagian penduduk untuk bermigrasi untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Di sisi lain, korporasi besar yang ada di Provinsi Lampung terlalu berpusat pada teknologi yang akan menutup kemungkinan pekerja yang memiliki *skill* rendah (penduduk lokal) untuk mendapatkan pekerjaan. Akibatnya banyak anak muda yang merantau ke Jakarta dan provinsi lainnya sehingga terlihat seperti tingkat pengangguran rendah.

Gambar 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Provinsi Lampung dan Indonesia Agustus 2015 dan Agustus 2017 (%)



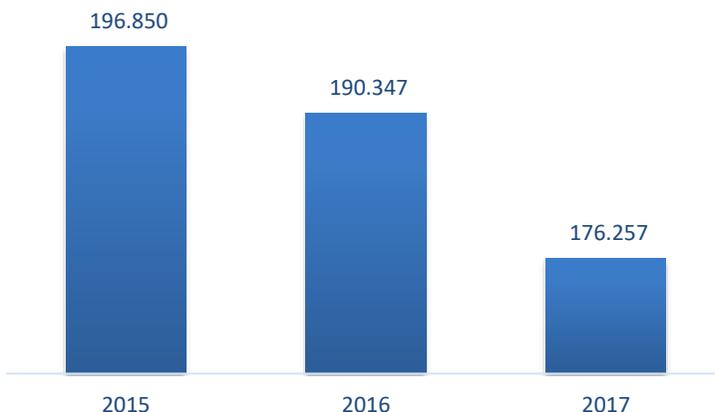
Sumber: Sakernas, diolah

Sebagai contoh, Kabupaten Mesuji memiliki angka pengangguran yang rendah karena di wilayah tersebut penduduknya relatif sedikit dibandingkan wilayah kabupaten lain karena ke luar daerah mencari pekerjaan yang lebih baik. Rendahnya angka pengangguran di Mesuji karena di wilayah tersebut penduduknya relatif sedikit dibandingkan wilayah kabupaten lain. Sementara itu, komoditas seperti udang, karet, dan sawit menjadi mata pencaharian (yang tidak membutuhkan kompetensi yang tinggi) yang menyerap sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut. Saat ini, harga komoditas tersebut sedang naik, sehingga banyak masyarakat yang tertarik menggeluti pekerjaan tersebut. Selain itu, saat ini di Mesuji juga terdapat banyak proyek pembangunan infrastruktur gedung pemerintah daerah, sebagai pemda yang baru mekar, sehingga banyak masyarakat yang terserap ke sektor tersebut.

Sebaliknya, Bandar Lampung masih menjadi wilayah yang memiliki TPT paling tinggi sejak 2015 hingga 2017. Sementara itu, Kabupaten Mesuji mengalami penurunan paling drastis di antara wilayah lain dari 5,06 poin pada 2015 menjadi 0,65 persen pada 2017. Pengangguran yang tinggi di Bandar Lampung disebabkan oleh arus urbanisasi dari desa ke kota yang tidak diiringi dengan lapangan kerja yang memadai. Masyarakat desa yang datang ke kota juga tidak membawa kapasitas yang cukup untuk masuk ke dalam sektor formal.

Sementara itu, jumlah pengangguran cenderung menurun dari tahun ke tahun. Angkanya bahkan turun cukup drastis pada tahun 2017, dari sekitar 190 ribu orang, menjadi 170 ribu orang pada 2017.

Gambar 3.12 Jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung dan Indonesia Agustus 2015 dan Agustus 2017 (orang)

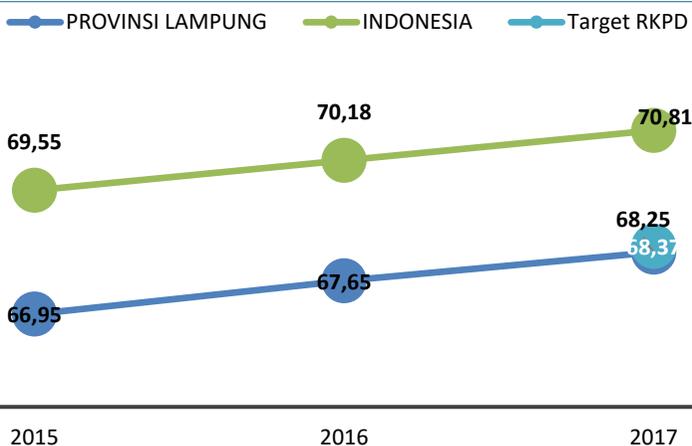


Sumber: Badan Pusat Statistik

Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode tahun 2011 s.d. 2016 IPM Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 64,20 di tahun 2011 menjadi 67,65 di tahun 2016. Namun, IPM Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata IPM nasional. Daya saing SDM Lampung tergolong rendah. Kualitas penduduk Lampung yang diukur berdasar indikator IPM telah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Namun, bila dibanding dengan daerah lain (ditingkat regional Sumatera maupun pada lingkup nasional) tampak bahwa capaian pembangunan SDM di Lampung masih cukup tertinggal.

Gambar 3. 13 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung dan Indonesia 2015 - 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Capaian IPM sudah cukup baik karena sejajar dengan perkembangan di tingkat provinsi. Namun, dikarenakan Provinsi Lampung memang memulai dari posisi yang kurang baik, hingga saat ini capaiannya belum dapat melebihi rerata nasional. Menurut mereka, angka pada komponen pendidikan yang hingga saat ini masih rendah, sehingga memerlukan intervensi lebih lanjut.

Angka Partisipasi Sekolah yang rendah serta angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga cukup banyak penduduk yang tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih bekerja membantu perekonomian keluarga, sebagai pekerja informal, buruh atau TKI/TKW. Kondisi kemiskinan di daerah dan kesadaran berpendidikan masih menjadi kendala di Provinsi Lampung.

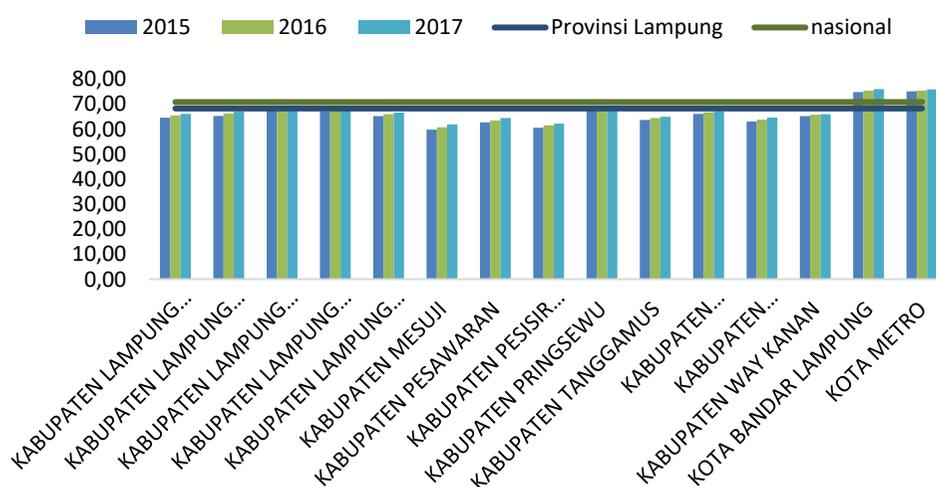
Tabel 3.1 Perbandingan IPM dan Komponennya Nasional dan Provinsi Lampung 2017

Unsur IPM	Nasional	Lampung
IPM	70,81	68,25
Harapan Lama Sekolah	12,85	12,46
Rata-Rata Lama sekolah	8,1	7,79
Angka Harapan Hidup	71,06	9,95
Pengeluaran Perkapita	Rp 10.664	Rp 9.413

Sumber: BPS, 2017

Peran yang telah diambil oleh pemerintah provinsi adalah fokus kepada pengembangan di pendidikan SMA dan SMK, sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014. Sejak tahun 2017, pemerintah provinsi telah meluncurkan program beasiswa kepada masyarakat miskin yang difokuskan ke 6 kabupaten/kota dengan capaian IPM yang relatif rendah. Sementara di tingkat kabupaten/kota, tidak semua pemerintah daerah memiliki program beasiswa pendidikan karena DAU dan PAD yang terbatas.

Gambar 3.14 Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung 2015 - 2017



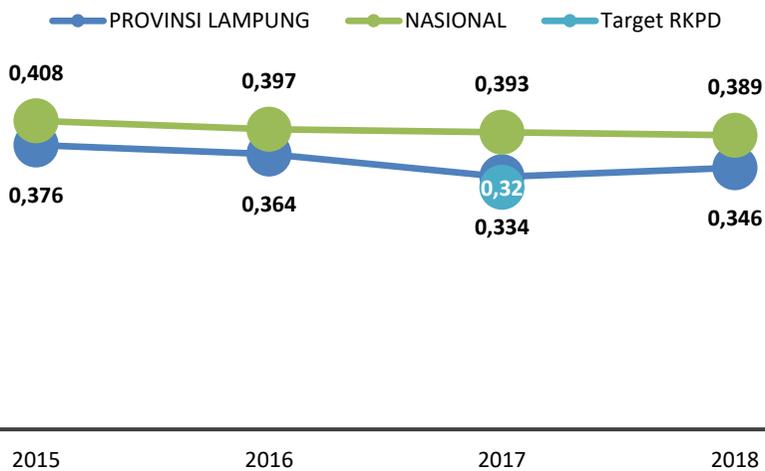
Sumber: Badan Pusat Statistik

Apabila dijabarkan ke dalam data perkabupaten/kota di Provinsi Lampung, dapat dilihat bahwa capaian IPM tertinggi masih diraih oleh wilayah perkotaan, yaitu bandar lampung dengan capaian 74.81 pada 2015 dan 75,98 pada 2017 dan kota metro dengan capaian 75,10 pada 2015 dan 75,87 pada 2017. Capaian ini terpaut cukup jauh dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain yang belum menyentuh angka 70 poin. Capaian terendah hingga saat ini diraih oleh Kabupaten Mesuji dengan capaian 59,79 (2015) dan 61,87 (2017), dan Kabupaten Pesisir Barat dengan 60,55 (2015) dan 62,20 (2017).

Indeks Gini

Berdasarkan data indeks gini bulan Maret pada empat tahun terakhir, indeks gini di Provinsi Lampung cenderung berada di bawah rata-rata nasional. Apabila dilihat dari pencapaiannya setiap tahun, angka ketimpangan di Provinsi Lampung juga menunjukkan hasil yang menggembirakan karena penurunannya melebihi capaian nasional pada tahun 2017. Namun, kemudian angkanya cenderung naik selama 2017-2018. Pada jangka waktu 2015-2017, penurunan gini rasio di Provinsi Lampung turun sebesar 0,043 poin dari 0,376 poin menjadi 0,334 poin, sementara di tingkat nasional, indeks gini hanya turun 0,019 poin, dari 0,408 menjadi 0,389 poin.

Gambar 3.15 Indeks Gini Provinsi Lampung dan Nasional Maret 2015 - Maret 2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

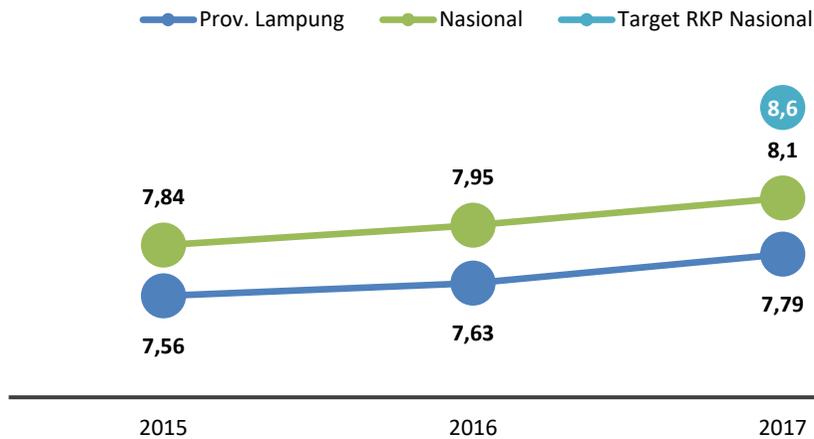
3.1.2 Indikator Prioritas Nasional RKP 2017

Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung menunjukkan peningkatan selama dua tahun terakhir. Keberhasilan ini bisa dilihat pada peningkatan akses dan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Indikator rata-rata lama

sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas naik dari tahun ke tahun. Meskipun tidak terlalu signifikan namun peningkatan ini menunjukkan bahwa kesempatan sekolah penduduk semakin besar. Komitmen dan kesadaran semua pihak akan pentingnya bersekolah, perlu terus disosialisasikan agar dalam jangka panjang terwujud sumber daya manusia yang berkualitas.

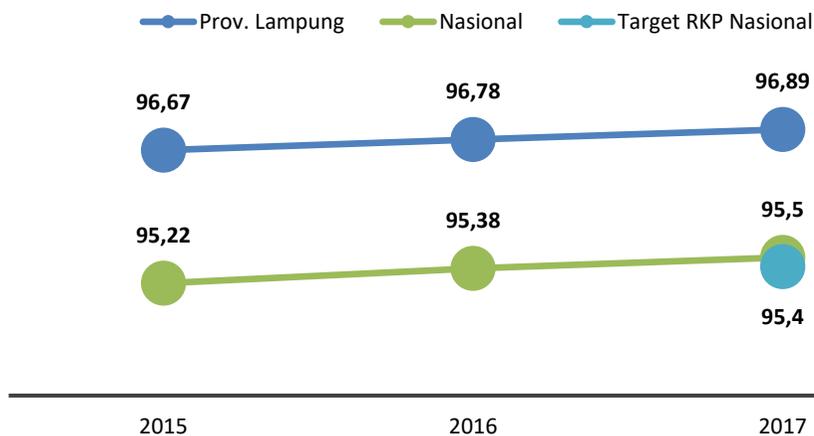
Gambar 3. 16 Perkembangan Rata rata Lama Sekolah Provinsi Lampung 2015 - 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Lampung pada periode 2015-2017 cenderung berada di bawah rata-rata nasional pada periode yang sama. Pada tahun 2015, rata-rata lama sekolah mencapai 7,56 tahun, naik pada tahun 2016 menjadi 7,63 tahun, dan kemudian naik lagi menjadi 7,79 tahun. Peningkatan-peningkatan ini cenderung sejalan dengan peningkatan rata-rata lama sekolah secara nasional.

Gambar 3. 17 Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Lampung 2015 - 2017



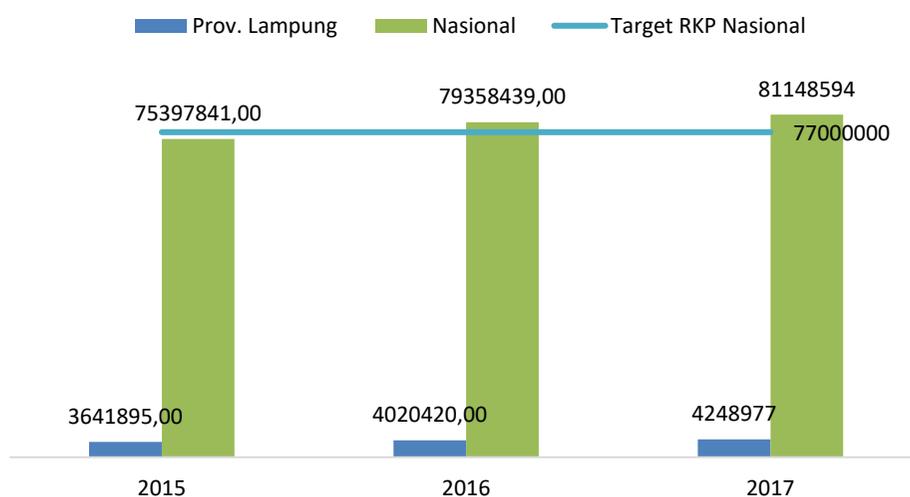
Sumber: Badan Pusat Statistik

Angka melek huruf Provinsi Lampung secara keseluruhan selama 2015-2017 sedikit berada di atas rata-rata nasional dengan angka di atas 96 persen. Angka ini naik sedikit demi sedikit atau cenderung konsisten pada periode tiga tahun tersebut. Program peningkatan kualitas tenaga pendidik dapat memberikan solusi untuk mengatasi daya saing SDM di Lampung. Demikian juga program kejar pendidikan paket A, B, C perlu diperbanyak karena menjadi sangat penting, karena mereka harus tetap membantu ekonomi keluarga, termasuk memperbanyak pendidikan - pendidikan informal bersertifikat. Kehadiran dan meningkatkan peran dan fungsi BLK juga perlu dilakukan di Lampung untuk meningkatkan daya saing SDM di Provinsi Lampung.

Kedaulatan Pangan

Produksi padi di Provinsi Lampung pada periode 2015-2016 cenderung meningkat seiring dengan tingkat produksi secara nasional. Pada tahun 2015, terdapat 3.641.895 ton padi yang diproduksi, kemudian meningkat menjadi 4.248.977 ton padi pada tahun 2017.

Gambar 3.18 Perkembangan Produksi Padi Lampung 2015 - 2017



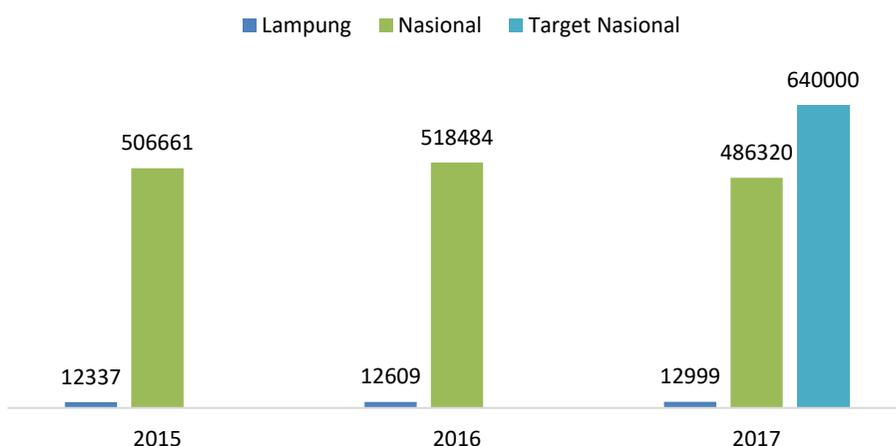
Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, diolah

Capaian positif ini nampaknya disebabkan oleh upaya maksimal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung dengan menambah luas areal sawah yang telah dimulai sejak tahun 2014. Luas areal tanam sawah dari seluas 656.023 ha pada tahun 2014, meningkat seluas 58.638 ha sehingga menjadi 714.662 ha pada tahun 2015. Angka ini merupakan yang terbesar kedua setelah perluasan lahan pertanian di Jawa Timur. Beberapa kegiatan strategis terpadu untuk meningkatkan produksi padi juga dilakukan, di antaranya gerakan pengendalian hama,

pembasmian tikus dan sanitasi lahan, percepatan pengolahan lahan dan tanam serta pengendalian OPT lainnya.

Untuk percepatan sawah, Provinsi Lampung didukung oleh pencetakan 341.000 ha pada 2016, dengan bantuan dari Kementerian Pertanian. Di samping itu, Balai Besar Pertanian di Lampung, diminta Kementerian PUPR untuk memperbaiki jaringan irigasi teknis, sehingga air yang tadinya tidak sampai di wilayah Lampung Timur, sekarang sudah mulai dilakukan. Pemerintah Provinsi juga menjadikan ini sebagai prioritas. Hal ini yang menunjang peningkatan indeks penanaman (IP) dan produksi padi.

Gambar 3.19 Perkembangan Produksi Daging Sapi 2015 - 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, diolah

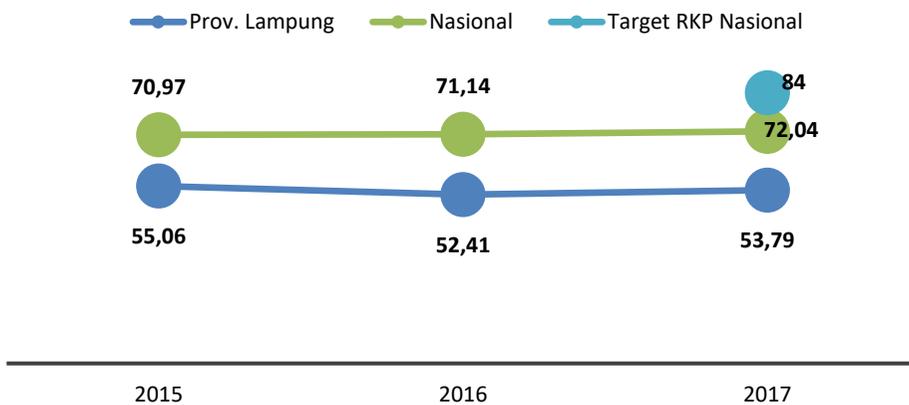
Capaian produksi daging sapi di Provinsi Lampung cenderung meningkat walaupun tidak signifikan peningkatan produksi pada tingkat nasional. Setiap tahun selama periode 2015-2017, peningkatan produksi daging sapi berada di sekitar angka 300 – 500 ton dengan rincian: 12.337 ton meningkat menjadi 12.609 ton di tahun 2016, dan kemudian meningkat lagi menjadi 13.150 pada 2017.

Dalam RKPD Provinsi Lampung 2018, budidaya sapi Lampung menjadi salah satu fokus perencanaan dalam upaya peningkatan kedaulatan pangan. Sejalan dengan itu, Kabupaten Lampung Tengah dipilih menjadi “pilot project” atau percontohan percepatan sapi bunting melalui program Upaya Khusus Percepatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (Upsus Siwab) di Sumatera, karena memiliki potensi sektor peternakan. UPTD inseminasi buatan ditarget oleh ditjen peternakan, untuk UPSUS SIWAB, sudah cukup banyak anakan sapi dari program tersebut.

Perumahan dan Permukiman

Akses masyarakat di Provinsi Lampung terhadap air minum layak secara umum masih jauh berada di bawah rata-rata nasional dalam periode 2015-2017. Angka-angka tersebut menjadi Provinsi Lampung salah satu yang memiliki akses terhadap air minum layak terendah di Indonesia. Persentase masyarakat dengan akses sanitasi layak di Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 3.20 Akses Air Minum Layak Provinsi Lampung 2015-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dilihat dari pencapaiannya, tidak seperti capaian di nasional yang cenderung konsisten membaik dari tahun ke tahun, capaian akses terhadap air minum layak di Provinsi Lampung bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016, capaian sempat memburuk dari sebelumnya 55,06 persen di tahun 2015, menjadi hanya 52,41 persen. Kemudian, pada tahun 2017 kembali membaik menjadi 53,79 persen. Akses air minum di Provinsi Lampung masih sangat rendah. Kondisi ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- Begitu luasnya penduduk yang harus dilayani, sementara kapasitas terbatas. Di kabupaten dengan wilayah yang luas seperti Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji yang dipenuhi rawa, pemerintah daerah tidak cukup mampu berinvestasi di air bersih ini sehingga masyarakat di ketiga kabupaten ini kesulitan untuk mendapatkan air bersih serta kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi. Sehingga sebagian penduduk terpaksa menggunakan irigasi rawa.
- DAK kabupaten/kota terbatas,
- Sumber air yang terbatas sehingga tidak semua PDAM ada dan beroperasi di setiap kabupaten.
- Kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi.

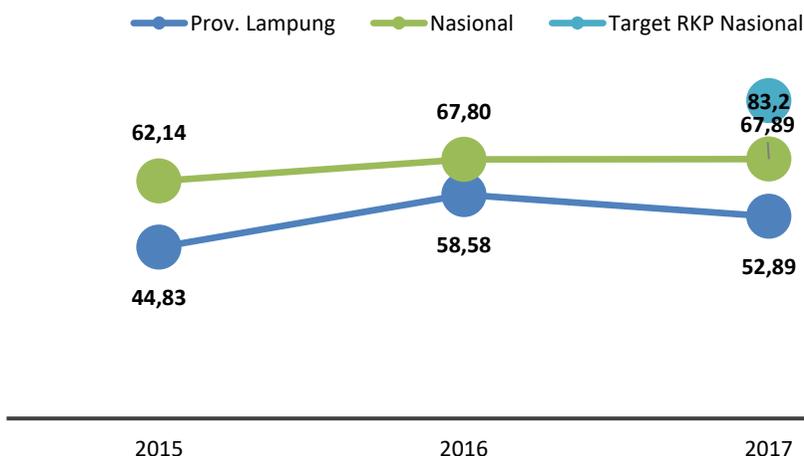
Melihat kondisi ini, Pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Lampung memperoleh program bantuan Pamsimas. Berdasarkan data Pamsimas (2017) saat ini di Provinsi Lampung sudah ada 172 desa sasaran yang menjadi penerima bantuan Pamsimas. Sementara itu, untuk penyediaan air minum di wilayah perkotaan, di Provinsi Lampung saat ini terdapat 6 PDAM (UPT) yang masih beroperasi dengan kondisi baik.

Untuk mendukung masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi ini, diperlukan peningkatan peran pemerintah kabupaten/kota sebagai penanggungjawab utama dengan upaya dan program yang bersungguh-sungguh serta berinisiatif untuk memperluas akses air minum dan sanitasi karena nampaknya pemerintah kabupaten/kota juga masih kurang serius dan respons terhadap urusan ini.

Akses sanitasi layak

Persentase masyarakat dengan akses sanitasi layak di Provinsi Lampung masih berada di bawah rata-rata nasional dalam tiga tahun terakhir. Berbeda dengan pencapaian di tingkat nasional yang cenderung meningkat setiap tahun selama periode 2015-2017, perkembangan akses sanitasi layak di Provinsi Lampung fluktuatif. Pada tahun 2015, hanya 44,83 persen masyarakat yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, kemudian meningkat jadi 58,58 persen pada 2016, dan kembali turun menjadi 52,89 persen. Angka-angka ini masih berada cukup jauh di bawah rata-rata nasional yang dari tahun ke tahun konsisten berada di atas angka 60 persen.

Gambar 3.21 Akses Sanitasi Layak Provinsi Lampung 2015-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

Terkait dengan pencapaian sanitasi layak, pemerintah Provinsi Lampung merasa sangat sulit untuk memenuhi target pemerintah 100-0-100 pada tahun

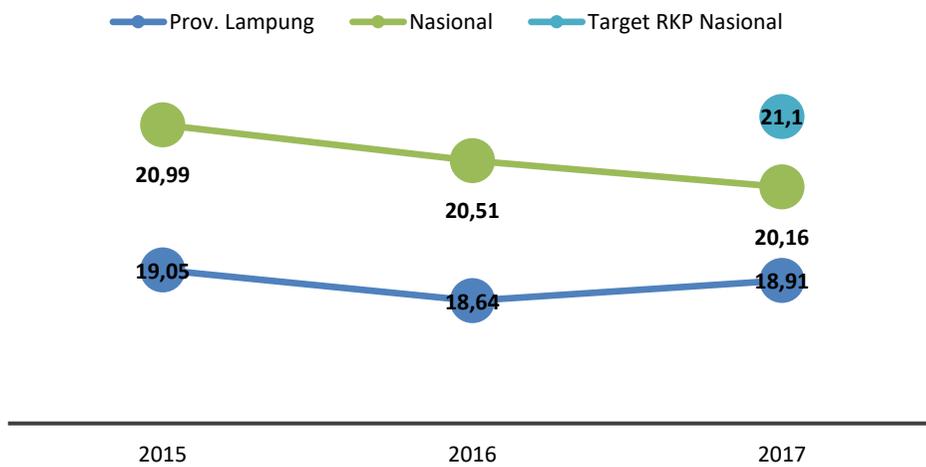
2019. Pemerintah merasa keinginan dan inisiatif dari pemerintah kabupaten/kota sebagai penanggungjawab utama dari urusan air minum dan sanitas, masih rendah. Pemerintah kabupaten/kota juga masih kurang responsif terhadap urusan ini. Di sisi lain, kasus-kasus seperti mutasi pejabat di pemerintah kabupaten/kota juga cukup sering terjadi, sehingga mengganggu ritme pelaksanaan program terkait air minum dan sanitasi.

Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya melaksanakan beberapa program terkait sanitasi selama tiga tahun terakhir, diantaranya:

1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), baru dilakukan untuk Kab di Lampung Selatan dan Pringsewu.
2. Program sanitasi perdesaan untuk 3 kabupaten yaitu Pringsewu, Lampung Selatan dan Tanggamus.

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

Gambar 3.23 Perkembangan Kontribusi Industri (%) terhadap PDRB Provinsi Lampung 2015 - 2017



Sumber: Badan Pusat Statistik

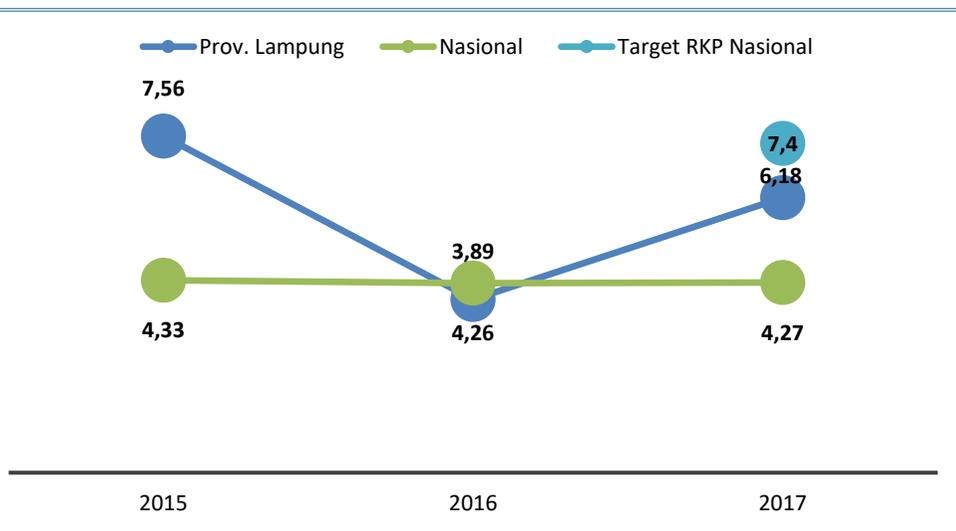
Namun demikian, kontribusi sektor industri terhadap PDRB pada periode yang sama masih berada di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 18-19 persen. Kawasan Industri Lampung Selatan yang saat ini sedang dalam proses menukar lahan pengganti dari kawasan register hutan. Sebagai salah satu kawasan industri yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, Kawasan Industri Maritim (KIM) hingga saat ini belum beroperasi. KIM akan dibangun diatas lahan milik Pertamina dan disupervisi oleh Kementerian Pertahanan. Pelabuhan juga akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa.

Pemerintah kabupaten setempat berperan dalam memperbaiki jalan kabupaten sepanjang 20 km dari ruas jalan nasional menuju KIM.

Laju produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Provinsi Lampung meningkat, namun laju produksi industri mikro kecil menurun. Pada triwulan III tahun 2018 laju produksi manufaktur mengalami kenaikan sebesar 29,53 persen dibandingkan triwulan II tahun 2018 atau meningkat 14,10 persen. Hal ini memperlihatkan bahwa produksi di triwulan III tahun 2018 di sektor industri lebih besar dari triwulan yang sama tahun 2017. Faktor yang menyebabkannya adalah terjadinya peningkatan produksi produk-produk dari industri besar dan sedang karena harga komoditas (ekspor) meningkat.

Di sisi lain, produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Provinsi Lampung pada triwulan III tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar 1,40 persen dibandingkan dengan triwulan II tahun 2018. Adapun secara *year on year (y-on-y)*, pada triwulan III-2018 terjadi peningkatan sebesar 6,12 persen dari triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Gambar 3.24 Perkembangan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan ADHK (%) Provinsi Lampung 2015 - 2017



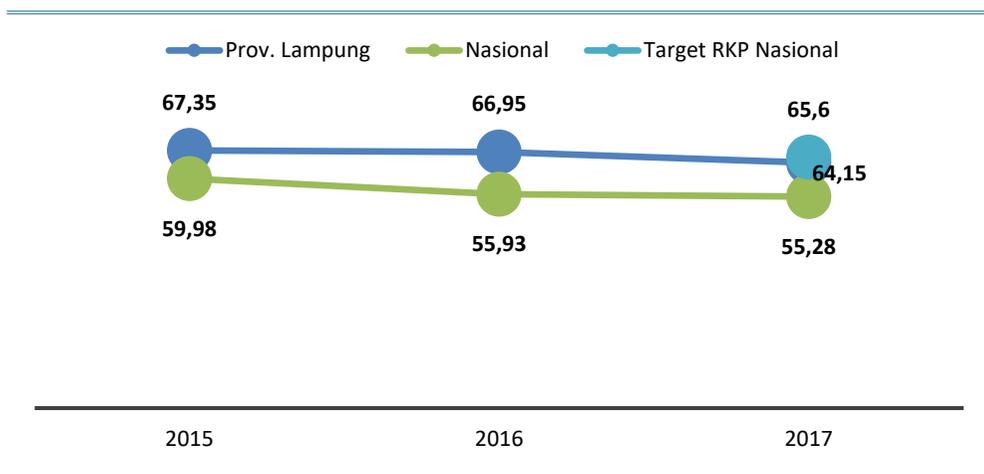
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2015-2017, pertumbuhan sektor industri di Provinsi Lampung sangat fluktuatif. Pada tahun 2015, pertumbuhan sektor industri mencapai 7,56 persen, namun kemudian turun signifikan menjadi 3,89 persen. Pada tahun 2017, angka ini naik kembali menjadi 6,18 persen. Capaian ini sangat berbeda dengan capaian di tingkat nasional yang cenderung stabil di angka sekitar 4,2-4,3 persen.

Kesehatan

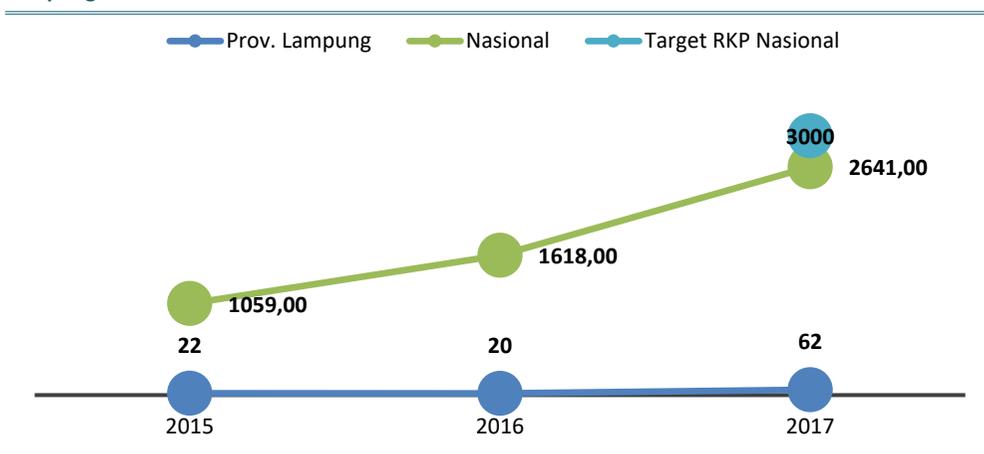
Angka prevalensi penggunaan kontrasepsi di Provinsi Lampung secara keseluruhan pada periode 2015-2017 berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, angka ini cenderung menurun pada periode waktu tersebut. Pada tahun 2015 angkanya mencapai 67,35 persen, kemudian turun menjadi 66,95 persen pada tahun 2016, dan turun lagi menjadi hanya 64,15 persen Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi. Namun demikian, terdapat perbedaan data terkait dengan penggunaan kontrasepsi. Berdasarkan data dari dinas kependudukan dan catatan sipil Provinsi Lampung, pada tahun 2017 terdapat sebesar 72,76 persen akseptor KB di Provinsi Lampung.

Gambar 3.22 Perkembangan Angka Prevalensi Kontrasepsi (%) Provinsi Lampung 2015 - 2017



Sumber: BPS dan Kementerian Kesehatan, diolah

Gambar 3.23 Perkembangan Jumlah Puskesmas yang minimal 5 Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Lampung 2015 - 2017



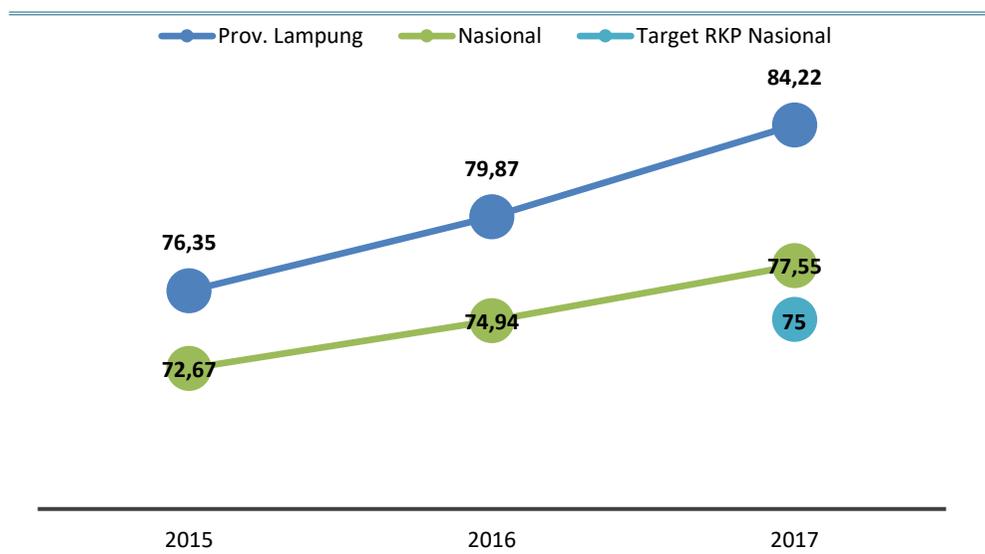
Sumber: Kementerian Kesehatan, diolah

Jumlah puskesmas dengan minimal 5 jenis tenaga kesehatan di Provinsi Lampung mencapai 128 puskesmas pada tahun 2017. Angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 46 unit puskesmas pada tahun 2015 dan kemudian total 80 unit di tahun 2016. Laju pertumbuhan jumlah puskesmas dengan minimal 5 jenis tenaga kesehatan ini cenderung lambat apabila dibandingkan dengan percepatan di tingkat nasional yang pertumbuhannya mencapai 60 persen selama tahun 2016-2017.

Antar Kelompok Pendapatan

Dari segi kepemilikan akte lahir, persentase anak di Provinsi Lampung yang telah memiliki akte lahir secara keseluruhan berada di atas rata-rata nasional selama tahun 2015-2017. Percepatannya juga cenderung lebih progresif dibanding pencapaian di tingkat nasional. Pada tahun 2015 terdapat 76,35 persen, kemudian meningkat jadi 79,87 persen (2016), dan mencapai 84,22 persen pada 2017. Sementara itu, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Lampung, terdapat sebanyak 92,25 persen penduduk berusia 0-18 tahun di Provinsi Lampung yang sudah memiliki akte lahir.

Gambar 3.24 Perkembangan Kepemilikan Akte (40%) Provinsi Lampung 2015 - 2017

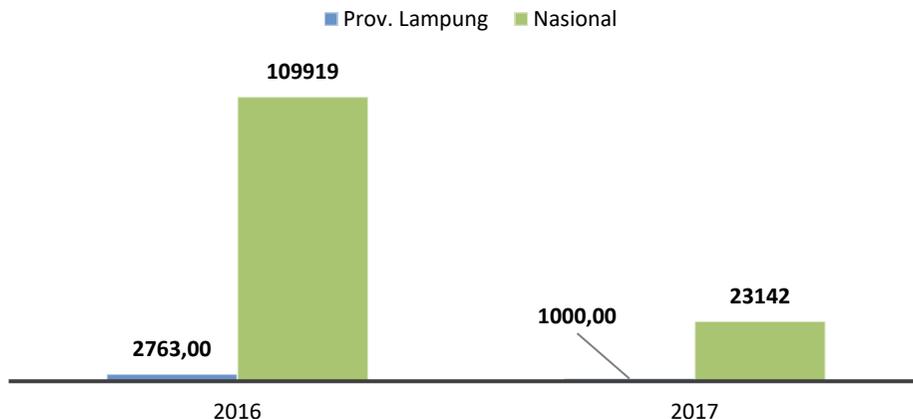


Sumber: Susenas BPS, diolah

Pencapaian yang cukup tinggi ini nampaknya didorong oleh upaya berbagai pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung untuk memberikan layanan pengurusan akte kelahiran secara gratis. Hal ini juga terkait dengan dicanangkannya kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Tenggamus, Pringsewu, dan Tulang Bawang Barat, serta Kota Bandar Lampung dan Kota Metro di Provinsi Lampung sebagai kabupaten/kota menuju layak anak.

Reforma Agraria

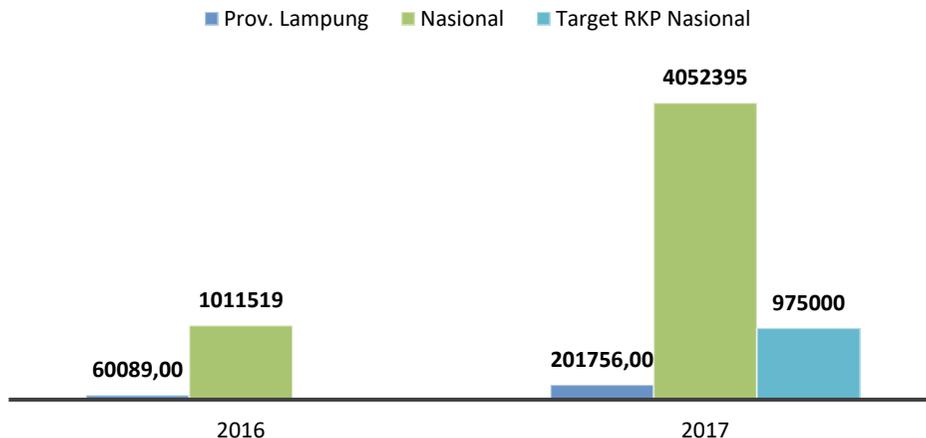
Gambar 3.25 Perkembangan Redistribusi Tanah Provinsi Lampung 2015 - 2017



Sumber: Kementerian ATR/BPN, diolah

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian redistribusi tanah di Provinsi Lampung pada tahun 2016-2017 mencapai 2763 bidang (2016) dan kemudian realisasinya menurun menjadi 1000 bidang di tahun 2017. Penurunan capaian ini seiring dengan menurun drastisnya jumlah tanah yang didistribusi secara nasional dari 109.919 bidang pada 2016, menjadi hanya 23.142 bidang di tahun 2017. Capaian nasional maupun di Lampung yang cenderung kurang maksimal ini nampaknya juga disebabkan oleh beberapa hambatan teknis di lapangan, yang di antaranya: (1) koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat yang kurang optimal, (2) ketepatan sasaran redistribusi lahan yang terkendala ketiadaan dokumen kependudukan.

Gambar 3.26 Perkembangan Sertifikat Hak Atas Tanah Provinsi Lampung 2015 - 2017



Sumber: Kementerian ATR/BPN

Peningkatan kepemilikan sertifikat hak atas tanah dimulai sejak tahun 2016. Peningkatan secara nasional cenderung signifikan, sementara di Provinsi Lampung peningkatan pada periode 2016-2017 tidak terlalu signifikan, yaitu sekitar 60.089 bidang tanah pada 2016 menjadi 201.756 bidang di tahun 2017.

3.2 Analisis Relevansi

Sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Lampung telah dijabarkan dalam dokumen perencanaan RKPD 2017 dan RPJMD. Permasalahan-permasalahan yang ada juga telah coba dijawab dengan program dan indikator-indikator yang cukup relevan. Beberapa permasalahan, misalnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian, dilengkapi oleh program dan indikator yang sangat komprehensif dan terukur. Namun demikian, pada beberapa sektor masih terdapat permasalahan yang tidak disertai program dan indikator sesuai yang dibutuhkan.

Pertama, pada sektor pariwisata diakui bahwa Provinsi Lampung, masih mengalami masalah, di antaranya: (1) Belum memiliki ikon wisata dan paket destinasi wisata; (2) Pengelolaan objek dan daya tarik wisata belum didukung sarana dan prasarana yang baik, dan; (3) Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang pariwisata. Permasalahan yang dijelaskan sudah cukup jelas, sayangnya belum terdapat program-program dan indikator keberhasilannya yang langsung mengarah kepada masalah tersebut. Padahal, pemerintah Provinsi Lampung dapat merencanakan program seperti: (1) Mengembangkan destinasi wisata baru di wilayah potensi wisata; (2) Mendukung pembangunan sarana prasarana menuju dan di wilayah objek wisata, dan; (3) Program pelatihan tenaga profesional pariwisata. Masing-masing program tersebut di atas, dapat digunakan untuk menjawab masing-masing permasalahan. Kemudian, indikator yang digunakan dapat berupa: (1) Terbangunnya sekian banyak objek wisata baru selama tahun 2018; (2) Terbangunnya jalan dengan panjang sekian kilometer menuju wilayah destinasi wisata baru, dan; (3) Terlatihnya sekian banyak tenaga pariwisata profesional selama tahun 2018.

Isu yang serupa juga terdapat pada sektor penanggulangan kemiskinan. Dalam sektor ini, diakui bahwa terdapat dua masalah pokok, yaitu: (1) Persentase penduduk miskin masih pada kisaran 13 persen - 14 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional; (2) Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin. Program-program yang direncanakan untuk kedua permasalahan ini, sudah cukup relevan, namun kurang spesifik terhadap penanggulangan kemiskinan. Program yang ditawarkan masih bersifat umum dengan menysasar petani, peternak, UMKM, dan ekonomi perdesaan. Selayaknya, terdapat pula program yang khusus berbicara tentang kemiskinan dengan pendekatan yang juga berbeda, misalnya, program yang berupa cash transfer dan pemberdayaan ekonomi yang menysasar masyarakat miskin. Indikator yang dipergunakan juga harus mencerminkan target

penanggulangan kemiskinan, misalnya: angka kemiskinan yang turun pada tahun 2018.

Selanjutnya, permasalahan pada sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diakui ada dua, yaitu: (1) Masih rentan permasalahan *trafficking* terhadap perempuan dan anak dan (2) Masih sering timbulnya KDRT dan Kekerasan pada perempuan dan anak. Sementara program yang direnakan sudah cukup relevan menjawab dua permasalahan di atas, indikator pembangunan yang dijabarkan cenderung masih berorientasi proses, bukan output. Indikator yang diajukan di antaranya: (1) Berjalannya peran mitra kerja pemerintah dalam menangani kekerasan (68 persen pada 2018); (2) Terbentuknya Perda PUG, focal point dan pokja PUG di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi (69 persen pada 2018). Seharusnya, indikator yang diberikan pada dokumen ini langsung menyorot kepada output atau bahkan *outcome* program yang ada, misalnya: (1) Berkurangnya jumlah anak dan perempuan korban TPPO; (2) Berkurangnya pelaporan kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

Terakhir, terkait sektor investasi dan penanaman modal. Terdapat satu masalah yang cukup relevan dengan kondisi Provinsi Lampung, yaitu, pertumbuhan investasi yang belum tumbuh secara progresif, memerlukan dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai. Program yang ditawarkan untuk permasalahan ini sudah cukup relevan, yaitu (1) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; (2) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, dan; (3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Sayangnya, tidak ditemukan indikator yang digunakan untuk mengukur program yang telah direncanakan. Indikator seperti (1) Jumlah kawasan wilayah strategi cepat tumbuh yang terbangun pada tahun 2018; (2) Kuantitas infrastruktur, seperti panjang jalan, jumlah embung, dan sebagainya yang mendukung kegiatan usaha, yang terbangun pada 2018, dan (3) Jumlah angkutan antar kabupaten/kota yang berfungsi dengan baik, misalnya dapat menjadi indikator-indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian pada sektor ini.

Paradoks Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Lampung

Oleh: Dr. Marselina Djayasinga, S.E., M.Si.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung selama 3 tahun terakhir cukup kinclong karena berada di atas nasional, berturut-turut mencapai mencapai 5,13 persen (2015), 5,15 persen (2016), dan 5,17 persen (2017) namun dengan laju kenaikan 0,02 poin setiap tahunnya sementara penurunan laju kemiskinan -0,06 persen tahun 2015-2016 menjadi -0,6 persen tahun 2016-2017, sementara laju penurunan nasional -0,36 persen tahun 2015-2016 menjadi -0,22 persen tahun 2016-2017. Laju kenaikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung ini tidak seiring dengan penurunan laju tingkat kemiskinan. Fenomena ini telah menjadi sorotan nasional khususnya Bappenas yang saat ini sedang meneliti ada apa dengan pertumbuhan ekonomi di Lampung dan tulisan ini berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertumbuhan yang terjadi di Provinsi Lampung adalah pertumbuhan semu. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi tidak mendorong terjadi *trickle down effect* pertumbuhan. Mengapa?

Garis kemiskinan di Provinsi Lampung selama tiga tahun, 2015 – 2017 yang cenderung stagnan dimana jumlah penduduk miskin tahun 2017 sebanyak 1,131 juta jiwa atau 14,35 persen, di atas rata-rata jumlah penduduk miskin nasional, yaitu 11,22 persen. Demikian juga dengan tingkat kedalaman kemiskinan yang diukur dari jumlah pendapatan perkapita penduduk berkisar Rp384.882 perkapita per bulan atau mendekati Rp 10.000 per bulan per kapita atau kurang dari \$1 per hari. Menurut Bank Dunia, dengan pendapatan perkapita kurang dari \$1, dikategorikan dalam hidup di bawah garis kemiskinan. Angka keparahan kemiskinan Provinsi Lampung memang sempat naik pada tahun 2016 menjadi 0.70 persen, kemudian turun lagi menjadi 0.51 persen pada 2017 dan angka keparahan kemiskinan ini di atas keparahan nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung sebesar 68,25 tahun 2017, di bawah rata-rata IPM nasional yang mencapai 70,81. Indikasi lain yang dapat menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk Lampung adalah tingkat ketimpangan pendapatan dengan rasio gini.

Pertama, PDRB provinsi Lampung ini dihasilkan oleh sebagian besar produksi barang dan jasa yang berasal dari industri-industri yang sifatnya *resources based* dan berskala besar yang bergerak di sektor pertanian, perindustrian dan industri pengolahan, Industri-industri ini beroperasi dengan teknologi yang tinggi yang mengolah hasil-hasil pertanian kemudian di ekspor. (BPS, Lampung 2018).

Menurut BPS (2018), pada triwulan III-2018 subsektor industri besar mengalami kenaikan 29,53 persen dibandingkan triwulan II-2018 atau meningkat 14,10 persen, hal ini memperlihatkan bahwa produksi di triwulan III-2018 di sektor industri lebih besar dari triwulan yang sama tahun 2017. Industri-industri pengolahan yang ada sangat terpengaruh oleh nilai tukar dan harga komoditas di luar negeri. Ketika nilai tukar dolar menguat atau harga komoditas di luar negeri meningkat, maka nilai PDRB Lampung meningkat secara signifikan. Sementara produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (*q-to-q*) Provinsi Lampung pada triwulan III-2018 menunjukkan penurunan sebesar 1,40 persen dibandingkan dengan triwulan II tahun 2018. Adapun secara *year on year (y-on-y)*, pada triwulan III-2018 terjadi peningkatan sebesar 6,12 persen dari triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Kedua, sebagian besar penduduk Lampung berada di pedesaan (60 persen) dengan tingkat pendidikan 74 persen tamat SMP ke bawah? Penduduk banyak bekerja sebagai buruh pabrik, buruh lepas, buruh tani serta sektor informal lainnya yang tidak mensyaratkan ijazah dengan pendapatan rata-rata Rp384,882 per kapita per bulan.

Ketiga, rendahnya pendapatan dan daya beli masyarakat ini diperparah lagi dengan hadirnya inflasi di Provinsi Lampung dengan rata-rata kenaikan 5 persen per tahun. Kenaikan inflasi yang didorong oleh posisi geografis Provinsi Lampung sebagai *hinterland* dengan Jakarta menyebabkan tingkat kemahalan di Jakarta cepat menular ke Lampung.

Keempat, Angka jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung sebesar 4,62 persen tahun 2016, dan angka ini turun dibandingkan tahun 2015 sebesar 5,14 persen. Sebagian besar penduduk bekerja, namun mereka banyak bekerja terbatas sebagai buruh tani dan di sektor informal lainnya dimana jumlah pabrik atau investasi tidak bertambah signifikan. Sehingga penambahan industri yang mampu menyerap pekerja terbatas.

Kelima, berdasarkan angka indeks gini yang mencerminkan angka ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung, maka indeks di Provinsi Lampung tahun 2017 sebesar 0,36 atau dalam kategori ketimpangan sedang.

Keenam, walau banyak penduduk di Provinsi Lampung berada di atas garis kemiskinan, tetapi ternyata mereka berada "tipis dan sangat dekat" dengan trend garis kemiskinan itu, mereka sangat "rawan miskin". Ketika salah satu anggota keluarga sebagai pencari nafkahnya mengalami sakit atau meninggal dunia, maka keluarga itu langsung jatuh miskin.

Demikian juga ketika terjadi kenaikan inflasi misal akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM atau kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL), penduduk yang sebagian besar berada tipis di atas garis kemiskinan itu, akan langsung terperangkap dalam kemiskinan. Sektor IKM kurang tumbuh signifikan karena terkendala masalah pemasaran dan permodalan, termasuk bargaining petani sangat lemah.

Ketujuh, faktor kepemilikan lahan oleh petani yang makin kecil dan makin menurun juga memperlemah posisi tawar petani. Mereka hanyalah petani yang subsisten, dengan lahan yang sempit produksi terbatas yang hanya cukup memenuhi keperluan hidupnya, tanpa bisa dijual atau disimpan. Sehingga memang konsep atau program seperti Resi Gudang dll tidak berkembang di Provinsi Lampung yang dikenal sebagai lumbung padi.

Kedelapan, faktor kedekatan geografis Propinsi Lampung dengan Jakarta yang mempengaruhi perputaran uang (*velocity of money*) di Lampung. Penduduk Lampung banyak membelanjakan uangnya ke Jakarta, baik dalam bentuk kunjungan, liburan, rekreasi, berbelanja, berobat, makan-minum hingga menyekolahkan keluarganya. Kondisi ini juga diperparah karena sebagian besar penduduk yang tinggal di 14 kabupaten/kota di Propinsi Lampung, apakah sebagai PNS atau pengusaha, ikut juga membelanjakan uangnya di Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung atau langsung ke Jakarta karena ketimpangan antar kabupaten/kota. (i) Industri pariwisata di Provinsi Lampung seharusnya mampu memperbaiki keadaan ini yaitu mengurangi kemiskinan, asalkan dikelola secara profesional dan menyeluruh. Permasalahannya adalah, saat ini beberapa objek wisata yang potensial di Propinsi Lampung seperti wisata bahari, wisata agroindustri belum dikelola secara profesional.

Mencermati kondisi di atas, tampak ada paradoks antara pertumbuhan ekonomi yang "*kinclong*" dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung yang cukup memprihatinkan. Sehingga diperlukan strategi untuk pembangunan perekonomian Propinsi Lampung dengan program yang *extraordinary* terutama untuk mengatasi kemiskinan melalui pertumbuhan yang inklusif, pertumbuhan dengan mengurangi ketimpangan. Kinerja perekonomian dan kebijakan yang diambil sebaiknya tidak hanya diukur dengan melihat besaran angka pertumbuhan ekonomi semata tetapi lebih melihat struktur ekonomi yang membentuknya, ketimpangan, kedalaman garis kemiskinan. Lingkaran kemiskinan di Provinsi Lampung dapat diselesaikan melalui pendidikan.

Namun karena sebagian besar penduduk usia sekolah ada di pedesaan yang mereka tetap harus membantu orang tuanya mencari nafkah, maka jenis pendidikan yang sebaiknya diperbanyak adalah pendidikan dengan paket A, B, dan C, serta pendidikan nonformal bersertifikat serta memperbanyak program pendidikan ketrampilan yang praktis yang bisa untuk menjadi mata pencaharian. Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah harus mengatasi praktek monopoli terselubung, melalui upaya mengendalikan harga komoditas terutama komoditas yang memacu inflasi seperti bahan makanan dengan sungguh-sungguh. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan atau industri-industri di Provinsi Lampung yang peduli pada upaya pemberdayaan masyarakat dan menerapkan UMP secara konsisten.

Menyusun kembali program kemitraan antara perusahaan dan petani yang *win-win solution*. Oleh karena itu, perlu sinergi dan koordinasi pengelolaan objek-objek wisata yang secara profesional, apakah melalui BUMD yang profesional atau lembaga lain yang kompeten. Melakukan upaya debirokratisasi perizinan untuk mendorong hadirnya usaha-usaha baru untuk memecah pasar menjadi pasar persaingan. Perhatian pemerintah Provinsi Lampung, sebaiknya program pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tumbuh di masyarakat dengan membantu pemasaran dan pemodalan mereka. Program bagi industri besar, berupa mengarahkan CSR perusahaan besar untuk mendukung berkembangnya usaha IKM dalam bentuk kemitraan yang sehat dan *win-win solution*.



4 PENUTUP

Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Provinsi Lampung memperoleh capaian yang cukup positif atas indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks gini, dan indeks pembangunan manusia selama 2015 – 2017. Capaian pada indikator-indikator tersebut mengalami perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, meskipun beberapa masih berada di bawah capaian nasional dan target yang telah ditetapkan oleh RKPd dan RPJMD.

Beberapa masalah yang menjadi kendala dapat teridentifikasi. Masalah konektivitas antar wilayah, terutama perkotaan dengan perdesaan masih minim. Infrastruktur jalan dan sarana transportasi telah mengisolasi wilayah-wilayah pedesaan sehingga perekonomian masih sangat bergantung pada hasil alam. Industri pengolahan yang hadir belum mampu menyerap tenaga kerja lokal, alhasil tidak maksimal menurunkan angka pengangguran. Sementara penduduk Lampung masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Isu disparitas pembangunan masih menjadi faktor utama timpangnya capaian indikator makro, seperti IPM dan tingkat kemiskinan antara wilayah desa dan kota.

Masalah lainnya adalah kebocoran wilayah yang terjadi antara Lampung dan Pulau Jawa. Kedekatan geografis nampaknya menjadi kerugian karena pembentukan modal dan perputaran uang masyarakat Lampung seringkali terjadi di Pulau Jawa. Akibatnya, kegiatan ekonomi di pusat-pusat industri dan perkantoran di Lampung sangat terbatas. Pertumbuhan industri kecil dan menengah belum maksimal karena minimnya permintaan.

Terkait dengan indikator prioritas nasional, Lampung juga menunjukkan perbaikan selama tahun 2015 – 2017. Sayangnya, capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional. Dua indikator terkait perumahan dan permukiman, yaitu akses terhadap sanitasi dan air minum layak cenderung masih terhambat oleh kondisi geografis di tengah komitmen pemerintah kabupaten/kota yang juga masih rendah terhadap kedua isu tersebut. Sementara itu, indikator terkait pendidikan dan kesehatan juga masih berada di bawah rerata nasional karena distribusi tenaga dan fasilitas masih terkendala.

Sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Lampung telah dijabarkan dalam dokumen perencanaan RKPd 2017 dan RPJMD. Permasalahan-permasalahan yang ada juga telah coba dijawab dengan program dan indikator-indikator yang cukup relevan. Beberapa permasalahan, misalnya di sektor

pendidikan, kesehatan, dan pertanian, dilengkapi oleh program dan indikator yang sangat komprehensif dan terukur. Namun demikian, pada beberapa sektor masih terdapat permasalahan yang tidak disertai program dan indikator sesuai yang dibutuhkan.

Saran

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Lampung dapat melaksanakan beberapa alternatif kebijakan yang baik sifatnya jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Pertama, untuk mengatasi masalah ketimpangan antar wilayah, pemerintah provinsi dapat memulai dari penyediaan infrastruktur dasar yang merata di setiap kabupaten/kota, antara lain, sarana pendidikan mulai PAUD hingga SMA berkualitas, tenaga pendidik yang berkualitas, sarana kesehatan seperti Rumah Sakit Daerah yang lengkap dengan alat dan tenaga medis, pasar, dan sebagainya. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya akses jalan ke wilayah-wilayah pusat pertumbuhan, terutama di pedesaan. Investasi juga perlu didorong kepada pemenuhan pasokan listrik.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi perlu meningkatkan iklim investasi dengan beberapa cara. Pertama melalui debirokratisasi perizinan dalam bentuk penyederhanaan sistem, prosedur, waktu, dan transparansi perizinan. Pemerintah juga perlu memastikan keamanan dan kepastian hukum untuk para investor dalam bidang pertanahan. Profil investasi yang lengkap dan dinamis juga diperlukan untuk memudahkan calon investor menangkap peluang investasi di Lampung.

Selain mendorong hadirnya investasi besar, Pemerintah Provinsi melalui program kerjanya juga perlu fokus kepada hadirnya industri kecil dan menengah yang dikelola masyarakat. Diperlukan target untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDRB. Langkah yang dapat dilakukan adalah penambahan anggaran untuk bantuan permodalan UMKM, standarisasi, pelatihan/bintek, bantuan pengurusan izin: SNI, lolos izin BPOM, Halal MUI, penggunaan mesin dan teknologi tepat guna, kebijakan pemerintah daerah yang lebih tegas untuk menggunakan produk (pangan) lokal.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga perlu memecah pasar bagi komoditas-komoditas unggulan Lampung (singkong, kelapa sawit, karet, lada, kopi, pisang, nanas, dan rambutan) yang dikuasai usaha-usaha besar yang cenderung berperilaku monopoli dengan *value added* industri UMKM. Beberapa jenis industri turunan yang mungkin dilakukan, di antaranya: (1) Industri turunan singkong ke arah

pembuatanm tepung meizena, tepung singkong, minyak singkong, (2) Industri UKM lada bubuk, (3) Industri Tepung Pisang, dan (4) Buah kaleng (rambutan, bangkuang, *fruit cocktail*, nanas, papaya). Sebagai langkah lanjutnya, Pemerintah Provinsi perlu fokus kepada tumbuhnya industri-industri berskala RT melalui mempermudah pengurusan izin-izin usaha (SIUP, SITU) dan standarisasi, sertifikasi, produk halal, packing dan pemasaran.

Untuk meningkatkan daya saing manusia, Pemerintah Provinsi perlu fokus kepada peningkatan kualitas modal manusia. Di wilayah pedesaan, pemerintah provinsi perlu fokus dalam memperluas program paket A, B, dan C. Lembaga-lembaga pendidikan nonformal juga perlu diperluas dan disertifikasi. Untuk perekonomian, pemerintah provinsi perlu meningkatkan sektor ekonomi kreatif dan jiwa kewirausahaan dan membantu pemasaran melalui Dewan Riset Daerah (DRD).

LAMPIRAN



Lampiran

Tabel Analisis Relevansi RKPD dan RPJMD

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
1	<u>Pendidikan:</u> Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan.	Meningkatnya angka melek huruf; Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun; Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;	Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Pendidikan Dasar; Program Pendidikan Menengah; Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk Pendidikan; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya Angka Melek Huruf, meningkatnya jumlah lembaga pendidikan nonformal dan informal yang bermutu (98 persen pada 2018); Persentase ketercapaian SPM Pendidikan Dasar Kabupaten/kota dan Satuan Pendidikan (50 persen pada 2018); Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA/MA sederajat (76 persen pada 2018); Meningkatnya Kualifikasi akademik dan Kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan (85 persen pada 2018); Persentase guruyang mampu

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
					memanfaatkan teknologi dalam proses dan pelaksanaan pembelajaran (55 persen pada 2018); Meningkatnya mutu pengelolaan setiap satuan pendidikan (60 persen pada 2018)
2	<u>Kesehatan:</u> Kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	Kesehatan Ibu, Kesehatan Anak dan Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak; Perbaikan Gizi Masyarakat; Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah	Persalinan oleh Tenaga kesehatan terlatih (94 persen pada 2018); Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S) (83 persen pada 2018); Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (100 persen pada 2018); Terlihatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (100 persen pada 2018); Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, komplementer alternatif (55 UT);

Provinsi Lampung

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
				Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; Upaya Kesehatan Tradisional; Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; Sumber Daya Manusia Kesehatan; Program Sumberdaya Kesehatan; Peningkatan Kesehatan Lingkungan; Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD; Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; Obat & Perbekalan Kesehatan	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit (95 persen pada 2018); Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (18 persen pada 2018); Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Kesehatan yang kompeten di bidangnya (97 persen pada 2018); Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas (92 persen pada 2018); BOR LOS TOI BTO GDR NDR (94,4 persen. 4,2 Hari 0,21 Hari 77,31 Kali 54/1000 20/100. pada 2018); Anggaran Kesehatan per kapita (97 persen pada 2018); Ketersediaan obat dan

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
					Vaksin (99 persen pada 2018)
3	<u>Pekerjaan umum:</u> Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mampu memberi dukungan optimal terhadap peningkatan mobilitas barang/jasa dan orang dalam mendukung perekonomian; Kualitas infrastruktur dan prasarana terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan bandar udara belum mampu mendukung kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih besar	Tersedianya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan system transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Pembangunan jalan dan jembatan provinsi di kabupaten/kota (80 persen pada 2018); Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan provinsi di Kabupaten/kota (80 persen pada 2018); Meningkatnya kualitas pengelolaan pembangunan, perencanaan teknis dan prioritas pembangunan perhubungan (85 persen pada 2018)

Provinsi Lampung

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
4.	<p><u>Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:</u></p> <p>Masih rentan permasalahan trafficking terhadap perempuan dan anak; Masih sering timbulnya KDRT dan Kekerasan pada perempuan dan anak</p>	<p>Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kesejahteraan keluarga;</p> <p>Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kesejahteraan keluarga</p>		<p>Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak; Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</p>	<p>Berjalannya peran mitra kerja pemerintah dalam menangani kekerasan (68 persen pada 2018); Terbentuknya Perda PUG, focal point dan pokja PUG di seluruh kabupaten/kota di Provinsi (69 persen pada 2018)</p>
5	<p><u>Kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan:</u></p> <p>Persentase penduduk miskin masih pada kisaran 13 persen - 14 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional; Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin</p>	<p>Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan</p>		<p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program Peningkatan Kesejahteraan Peternak; Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Program Pengembangan</p>	<p>Meningkatnya pendapatan petani (Rp/ha/tahun) (40 persen pada 2017); Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani (100 persen pada 2018); Meningkatkan dan Berkembangnya Kelembagaan Koperasi dan UMKM melalui penambahan jumlah koperasi aktif menjadi</p>

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
				Lembaga Ekonomi Pedesaan	3.250 unit, penyerapan jumlah tenaga kerja menjadi 8.089 orang dan jumlah UMKM menjadi 414.398 (100 persen pada 2018); Terwujudnya lembaga ekonomi pedesaan yang maju dan mandiri (125 desa pada 2018)
6	<u>Industri:</u> Pertumbuhan sektor industri skala besar masih relatif stagnan, sementara industri kecil dan menengah masih memiliki keterbatasan dalam hal daya saing produk dan pemasaran; Tingkat pendapatan regional penduduk secara bruto masih rendah dibandingkan rata-rata nasional	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM; Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan	Program Hilirisasi Produk Pertanian; Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; Program Peningkatan Ekspor	Kontribusi Subsektor Industri Makanan dan minuman terhadap PDRB Sektor Industri (73,58 persen); Meningkatnya volume ekspor hingga 10.528.040 ton dengan laju pertumbuhan ekspor sebesar 6,7 persen per tahun (100 persen pada 2018)

Provinsi Lampung

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
			pangan daerah dan nasional		
7	<u>Penanaman modal:</u> Pertumbuhan investasi yang belum tumbuh secara progresif, memerlukan dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai;	Tersedianya infrastruktur/ pra sarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan system transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi; Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan; Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Tercapainya peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi (100 persen pada 2018)

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
8	<u>Usaha perdagangan:</u> Komoditas ekspor Provinsi Lampung masih terbatas pada komoditas berbasis sumber daya alam, sehingga belum mampu memiliki daya saing maupun nilai tambah yang tinggi serta ketergantungan harga komoditas di pasar global;	Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung	Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM; Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional	Program Peningkatan Ekspor; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya volume ekspor hingga 10.528.040 ton dengan laju pertumbuhan ekspor sebesar 6,7 persen per tahun (100 persen pada 2018); Meningkatnya nilai tambah serta akses pemasaran produk (1,3 persen/ tahun pada 2018); Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah (80 persen pada 2018); Meningkatnya nilai tambah, daya saing, pangsa pasar produk peternakan (100 persen pada 2018)
9.	<u>Pertanian:</u> Kontribusi sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama dan produktivitasnya dalam	Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;	Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman	Peningkatan produktivitas lahan pertanian (0,86 persen/tahun pada 2018); Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan. (2,14

Provinsi Lampung

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
	perekonomian masih relatif rendah dan cenderung menurun; Pertanian memerlukan dukungan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi dan penataan kawasan/lahan pertanian berkelanjutan; Stabilitas harga ditingkatkan produsen maupun konsumen yang diikuti dengan distribusi pangan yang merata	Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang\maupun yang akan datang Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan; Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung	dan nasional; Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah; Revitalisasi pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional; Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM;	Pangan; Program Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan; Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan; Program Peningkatan Hasil Peternakan; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; Program Pengembangan Budidaya Perikanan; Program	persen/tahun pada 2018); Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura (1,74 persen pada 2018); Meningkatnya nilai tambah seta akses pemasaran produk (1,3 persen/ tahun pada 2018) Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah (80 persen pada 2018); Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas komoditas perkebunan (80persen pada 2018); Kontribusi Subsektor Peternakan Terhadap PDRB (persen) (100 persen pada 2018); Meningkatnya nilai tambah, daya saing, pangsa pasar produk peternakan (100 persen pada 2018); Peningkatan Produksi Perikanan

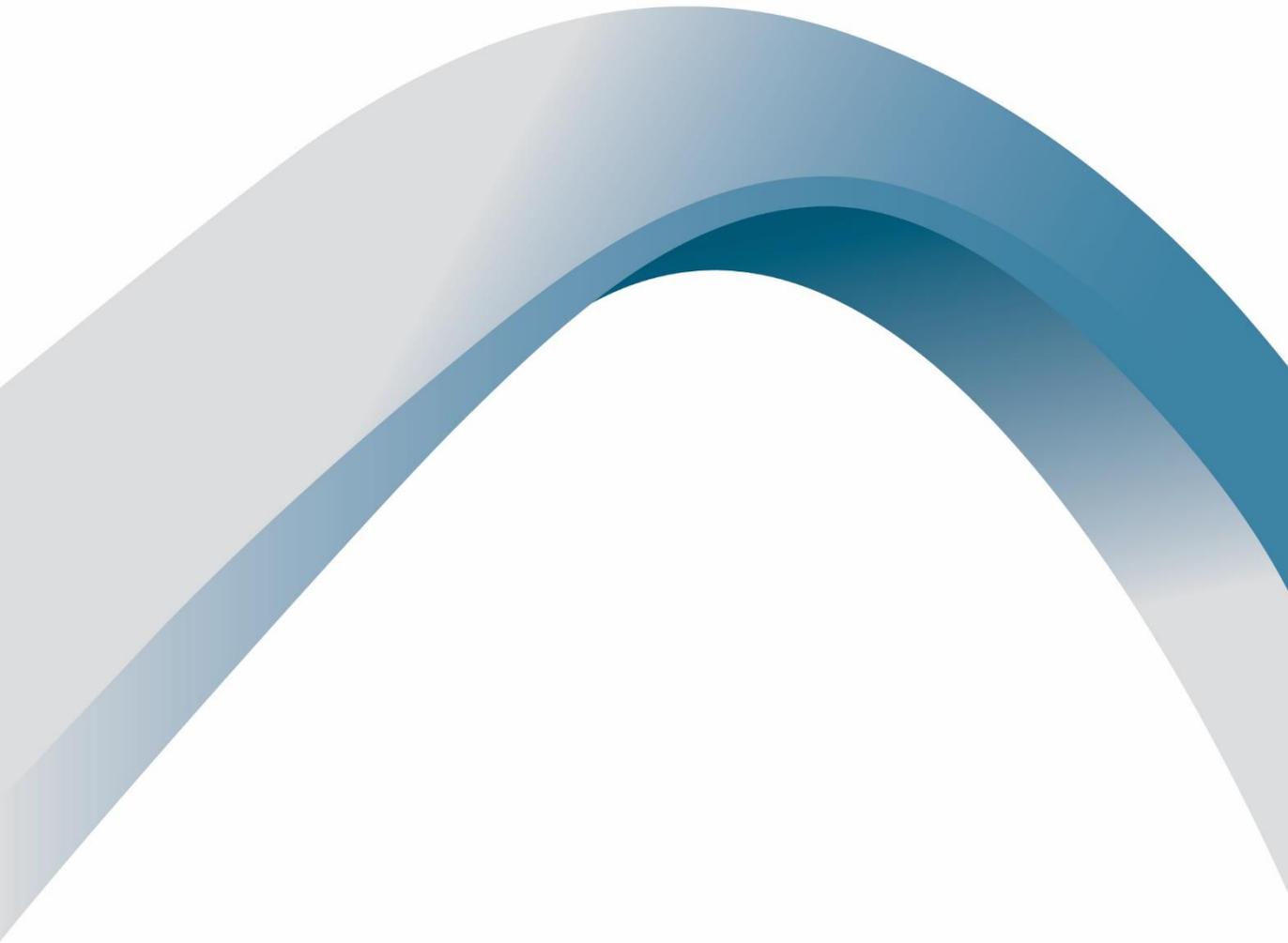
No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
			Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan	Pengembangan Perikanan Tangkap; Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Budidaya (ton) (94,23 persen pada 2018); Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (ton) (97,66 persen pada 2018); Peningkatan kinerja pengelolaan jaringan irigasi saluran primer dan sekunder sepanjang 3.840 m yang terdapat pada 19 Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi (seluas 16.640 ha)(90 persen pada 2018); Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan (90 persen pada 2018); Terlaksananya program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri melalui lancarnya sistem distribusi dan terpenuhinya kebutuhan

Provinsi Lampung

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
					pokok dan penting masyarakat serta meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (100 persen pada 2018); Terwujudnya lembaga ekonomi pedesaan yang maju dan mandiri (125 desa)
10	<p><u>Pariwisata:</u></p> <p>Belum memiliki ikon wisata dan paket destinasi wisata; Pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW) belum didukung sarana dan prasarana yang baik; Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang pariwisata, pengelolaannya belum terintegrasi</p>	<p>Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah; Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah; Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah</p>	<p>Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM; Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan</p>	<p>Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif</p>	<p>Peningkata Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara</p>

No	Permasalahan	Sasaran	Prioritas Daerah	Program Prioritas	Indikator Program Prioritas
			<p>daya saing koperasi & UMKM; Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi & UMKM</p>		

-HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN-



EKPD

DIREKTORAT PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH
DEPUTI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS